



KEMENTERIAN AGAMA RI
2025

INDEKS MODERASI BERAGAMA TAHUN 2025

Peta Moderasi Masyarakat Umum
& Masyarakat Pendidik





INDEKS MODERASI BERAGAMA 2025

Peta Moderasi Beragama Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik
@Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025

Sambutan Kepala Badan Moderasi Beragama dan PSDM
Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdani, S.T.P., M.T.

Kata Pengantar Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan PSDM
Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.

TIM PENYUSUN

Penulis:

1. Haris Burhani, S.E., M.A.P.
2. Rahmah Nur Fitriani, S.T., M.Ti
3. Lava Himawan, S.Pd.
4. Muammad Faridl Al Hasan, S.Ag.
5. Nisfu Amalia, S.H.
6. Dimas Ahmad Rizal, S.Pd.
7. Tri Admoko, S.Pd.
8. Rifda Nida'ul Labibah, S. Mat.
9. Mutiara Laila, S.Pd.
10. Farhan Hasbul Warits, S.Pd.

Kontributor:

1. Baihaki Mukhtar, S.H.I.
2. Abdul Syukur, S.Kom.
3. Rahmatillah Amin, S.Kom.

Penyunting:

1. Dr. Rizky Riyadu Taufiq, S.Th.I., M.A. (Kepala Bagian Umum, BMN dan Perpustakaan)
2. Haris Burhani, S.E., M.A.P. (Analisis Kebijakan BMBPSDM)

Penata Desain:

1. Surya Budhy
2. Dul Syakur



KATA SAMBUTAN

Delapan Program Prioritas (Asta Protas) Menteri Agama Tahun 2025-2029 dirumuskan secara cermat bukan hanya untuk mendekatkan umat beragama dengan ajaran agamanya, namun juga secara aktif menggiatkan kerukunan antarumat beragama, mendorong toleransi, serta penolakan terhadap bentuk ekstrimisme. Dengan demikian, secara mendasar Asta Protas mengemban nilai-nilai moderasi beragama yang menjadikannya pilar utama dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan toleran.

Survei Moderasi Beragama Tahun 2025 menjadi salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana nilai moderasi beragama telah diinternalisasi oleh masyarakat, sekaligus dasar penyusunan kebijakan Kementerian Agama dalam memperkokoh moderasi beragama. Survei ini merupakan afirmasi kita untuk membangun bangsa yang adil dan makmur, di mana harmoni adalah hasil yang terukur, dipelihara, dan dapat dipertanggungjawabkan. Survei ini penting sebagai upaya terstruktur pemerintah menyediakan data yang valid agar tidak salah langkah dalam penyusunan strategi penguatan moderasi beragama, menuju Indonesia yang lebih rukun, damai, dan penuh cinta kemanusiaan.

Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembaca dan memberikan dampak positif moderasi beragama di kalangan masyarakat. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat luas bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama yang lebih moderat, cerdas, dan bermartabat.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Moderasi Beragama dan PSDM

Prof. Dr. M. Ali Ramdhani, S.T.P., M.T.



KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Indeks Moderasi Beragama 2025: Peta Moderasi Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik ini dapat diselesaikan. Buku ini diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban BMBPSDM untuk mendiseminasikan hasil kajian Survei Moderasi Beragama kepada masyarakat, sekaligus bahan refleksi bagi pihak terkait dalam upaya merumuskan kebijakan dan program Penguatan Moderasi Beragama sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023.

Proses penyusunan buku ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pembacaan hasil survei, Focus Group Discussion (FGD), penulisan, hingga pembacaan ulang dengan kontribusi dari para analis kebijakan Kementerian Agama. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, para ahli dan semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya buku ini.

Buku ini merupakan upaya ilmiah untuk memetakan langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penguatan dan implementasi moderasi beragama. Tujuan penguatan ini adalah agar moderasi beragama dapat secara terstruktur dijadikan sebagai program nasional, sehingga melekat menjadi cara pandang baik bagi setiap individu maupun lembaga.

Semoga hadirnya buku ini dapat memberikan rekomendasi bagi rancangan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam membangun iklim masyarakat beragama yang lebih moderat dan harmonis.

Jakarta, Desember 2025
Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan PSDM

Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tentang Survei Moderasi Beragama

Survei Moderasi Beragama Tahun 2025 merupakan survei pertama yang secara khusus mengukur tingkat moderasi beragama masyarakat Indonesia. Nilai indeks yang dihasilkan menjadi salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana nilai moderasi beragama telah diinternalisasi oleh masyarakat, sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama. Pengukuran indeks ini dilandasi oleh empat buah dimensi yaitu, komitmen kebangsaan, toleransi beragama, anti kekerasan dan adaptif budaya lokal.

Survei Indeks Moderasi Beragama dilakukan melalui survei tatap muka yang dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2025 di 34 provinsi dengan jumlah responden 2.850 orang, terdiri dari 2.027 masyarakat umum dan 823 masyarakat pendidik. Penentuan sampel survei masyarakat umum menggunakan pendekatan Multistage Random Sampling dengan margin of error sebesar 2,22%, sedangkan pada masyarakat pendidik menggunakan pendekatan Cluster Random Sampling dengan margin of error sebesar 3,49%.

Temuan Kunci

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat moderasi beragama masyarakat Indonesia berada pada kategori Tinggi, baik pada masyarakat umum maupun pendidik. Pada masyarakat umum, nilai indeks mencapai 74,72 dengan dimensi komitmen kebangsaan menjadi kekuatan utama, diikuti oleh dimensi anti kekerasan. Masyarakat menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, serta konsisten dalam menolak cara-cara kekerasan atas nama agama. Dimensi Adaptif Budaya Lokal menjadi dimensi dengan capaian paling rendah, mengindikasikan masih terdapat ketegangan antara identitas agama dan budaya lokal. Banyak masyarakat yang menerima nilai agama secara doktriner tetapi belum melihat budaya lokal sebagai instrumen penguatan harmoni sosial.

Masyarakat pendidik menunjukkan tingkat moderasi yang tinggi dengan nilai mencapai 77,32. Polanya mirip dengan masyarakat umum, modal terbesar



adalah komitmen kebangsaan dan adaptasi budaya lokal menjadi titik terlemah. Tenaga pendidik yang cukup moderat cenderung menerima nilai toleransi dan anti kekerasan dengan baik, tetapi sebagian masih memiliki jarak dengan praktik-praktik budaya lokal tertentu di Indonesia.

Rekomendasi

Temuan survei rendahnya adaptasi terhadap budaya lokal menjadi hal yang harus diintervensi dan menjadi arah penguatan program moderasi beragama ke depan. Rekomendasi strategi dan rancangan penguatan moderasi beragama di antaranya Integrasi literasi budaya lokal dalam pendidikan dan kehidupan keagamaan, yang disusun berdasarkan 2 (dua) sasaran, yaitu masyarakat umum dan masyarakat pendidik. Pada tingkat pendidikan, langkah utamanya meliputi penyusunan modul pembelajaran berbasis budaya lokal serta pelatihan berjenjang bagi guru dan dosen agar mampu mengaitkan tradisi lokal dengan praktik keagamaan yang moderat. Untuk masyarakat umum, penguatan dilakukan melalui program komunitas seperti festival budaya, dialog agama-budaya, dan revitalisasi tradisi komunal.



DAFTAR ISI

	hal
Halaman Sampul	1
Sambutan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	3
Pengantar Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	4
Ringkasan Eksekutif	5
Daftar Isi	7
 BAB I PENDAHULUAN	 9
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tujuan dan Sasaran	11
1.3 Ruang Lingkup	11
 BAB III METODOLOGI	 12
2.1. Kerangka Penelitian	13
2.1.1 Komitmen Kebangsaan	14
2.1.2 Toleransi Beragama	14
2.1.3. Anti Kekerasan	15
2.1.4. Adaptif terhadap Budaya Lokal	15
2.2. Metode Penelitian	15
2.2.1. Teknik Sampel	20
2.2.2. Penentuan Level Indeks	21
2.3. Validitas, Reliabilitas dan Kontrol Kualitas	23
2.3.1. Pra Survei	23
2.3.2. Survei	23
2.3.3. Pasca Survei	24
 BAB III POTRET INDEKS MODERASI BERAGAMA (IMB) MASYARAKAT UMUM	 31
3.1. Profil Demografi Responden Masyarakat Umum	32
3.2. Potret IMB Nasional Masyarakat Umum	34
3.3 Potret Empat Pilar IMB Masyarakat Umum	35
3.3.1 Komitmen Kebangsaan	35
3.3.2. Toleransi Beragama	37
3.3.3. Anti Kekerasan	39
3.3.4 Adaptif Budaya Lokal	41
3.4. Potret IMB Menurut Demografi Masyarakat Umum	43
3.4.1. IMB Menurut Jenis Kelamin	44
3.4.2. IMB Menurut Wilayah	45
3.4.3. IMB Menurut Tingkat Pendidikan	46



BAB IV POTRET INDEKS MODERASI BERAGAMA (IMB) MASYARAKAT PENDIDIK	49
4.1 Profil Demografi Responden Masyarakat Pendidik.....	50
4.2 Potret IMB Nasional Masyarakat Pendidik	51
4.3 Potret Empat Pilar IMB Masyarakat Pendidik.....	53
4.3.1 Komitmen Kebangsaan.....	53
4.3.2 Toleransi Beragama	54
4.3.3 Anti Kekerasan	58
4.3.4 Adaptif Budaya Lokal	59
4.4 Potret IMB Menurut Demografi Masyarakat Pendidik.....	61
4.4.1 IMB Menurut Kategori	62
4.4.2 IMB Menurut Jenis Kelamin	63
4.4.3 IMB Menurut Status Lembaga.....	64
BAB V PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL	67
5.1 Budaya, Agama, dan Kontestasi Makna: Kerangka Penguatan Moderasi Beragama	68
5.2 Arah Strategi Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal	70
5.3 Dari Strategi ke Tindakan: Rancangan Intervensi Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal	72
5.4 Analisis dan Arah Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Budaya Lokal	74
BAB VI PENUTUP	76
Daftar Pustaka	79

INDEKS 2025
MODERASI
BERAGAMA

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

**Ketersediaan data
dasar (baseline)
Indeks Moderasi
Beragama mutlak
diperlukan
agar program
penguatan
moderasi
beragama dapat
berjalan terukur,
tepat sasaran, dan
berbasis bukti.**

Konsep Moderasi Beragama tidak datang dari ruang hampa. Moderasi beragama lahir dari dinamika kehidupan umat beragama yang makin kompleks. Persoalan-persoalan keagamaan yang sering muncul diantaranya penolakan pembangunan dan perizinan rumah ibadah yang sulit mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah, politisasi dan komodifikasi agama dalam kontestasi politik seperti penggunaan simbol dan slogan agama dalam kampanye politik dianggap sebagai bentuk komodifikasi agama yang berisiko memicu intoleransi hingga bentrokan fisik antar kelompok, serta eksklusivisme dan penolakan terhadap kearifan lokal yang ditandai dengan pembubaran pelaksanaan upacara adat.

Inti dari konsep Moderasi Beragama adalah memposisikan umat beragama untuk tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama (ekstremisme) dan tidak pula mengurangi esensi ajaran agama (liberalisme ekstrem), melainkan berada di tengah (wasathiyah) yang membawa kebaikan bagi diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menyatakan:

“Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.”

Kementerian Agama (Kemenag) dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya memperkuat Moderasi Beragama untuk mereduksi persoalan keagamaan yang ada pada umat beragama. Namun, hingga saat ini belum tersedia peta data yang komprehensif mengenai tingkat Moderasi Beragama masyarakat secara nasional. Kebutuhan data dasar (baseline) ini penting sehingga program penguatan Moderasi Beragama bisa terukur dan tepat sasaran.

Tahun 2025 Kementerian Agama RI melalui Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) melakukan pengukuran Indeks Moderasi Beragama (IMB) terfokus pada Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik. Riset ini ditujukan untuk memotret tingkat Moderasi Beragama Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik secara nasional, berdasarkan empat pilar yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal.



1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama dari pelaksanaan survei Indeks Moderasi Beragama (IMB) Tahun 2025 adalah:

- Memetakan nilai Indeks Moderasi Beragama (IMB) secara Nasional (Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik).
- Memetakan Indeks Moderasi Beragama (IMB) Tahun 2025 menurut dimensi Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan, dan Adaptif Budaya Lokal.

Sasaran adalah:

- Menghasilkan nilai IMB Nasional yang terukur dan terpercaya.
- Memetakan kondisi moderasi beragama secara mendalam di dua kategori responden utama: Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik (Guru, Dosen, Tenaga Kependidikan).

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan ini merupakan riset kuantitatif dengan metode survei tatap muka (face-to-face interview) di 34 provinsi di Indonesia. Adapun rincian subjek dan teknik pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Kategori Responden:

- Masyarakat Umum: Responden berusia 18-60 tahun, dipilih menggunakan metode acak bertingkat dengan kuota (multistage random sampling with quota) mempertimbangkan jumlah wilayah kabupaten/kota dan perdesaan hingga responden terpilih.
- Masyarakat Pendidik: Meliputi guru, dosen, dan tenaga kependidikan berusia 18-60 tahun, yang dipilih menggunakan metode kluster acak dengan kuota (cluster random sampling with quota) mempertimbangkan jumlah wilayah kabupaten/kota dan perdesaan dan Lembaga pendidikan hingga responden terpilih.



**Survei Indeks
Moderasi
Beragama 2025**
ini merupakan
riset kuantitatif
dengan cara survei
tatap muka di 34
provinsi dengan
dua kategori
responden yaitu
Masyarakat umum
dan Masyarakat
terdidik



FAKULTAS TEKNIK
INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
MATERI 2.5
BAB II

BAB II

METODOLOGI

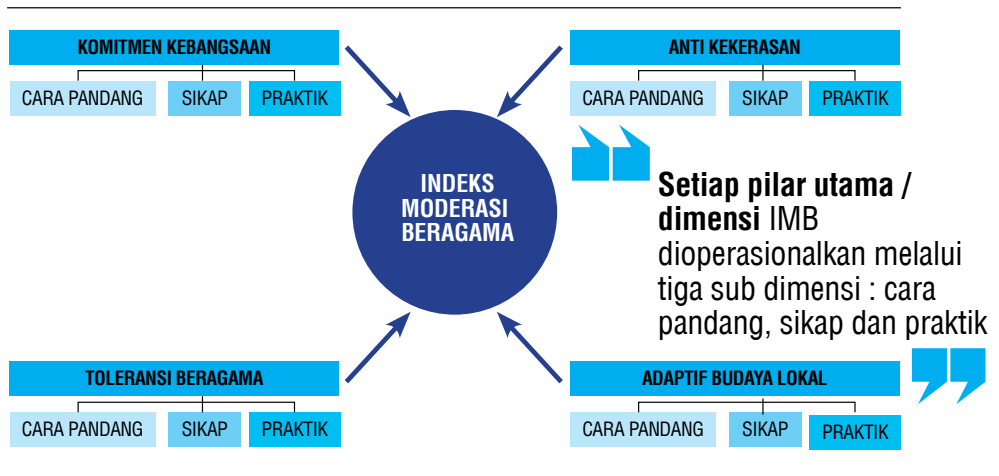
2.1. Kerangka Penelitian

Survei Indeks Moderasi Beragama (IMB) Tahun 2025 mengacu pada Program Kerja Kementerian Agama 2025 – 2029 yaitu meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Indeks ini disusun sebagai instrumen untuk memotret kondisi moderasi beragama masyarakat Indonesia secara nasional dan terukur.

Pengukuran IMB didasarkan pada empat pilar utama moderasi beragama berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 58 Tahun 2023 serta buku Moderasi Beragama oleh Lukman Hakim Saifuddin, yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi Beragama, Anti Kekerasan dan Adaptif Terhadap Budaya Lokal. Keempat pilar tersebut diposisikan sebagai dimensi pengukuran yang saling melengkapi dalam membaca relasi antar agama, negara, dan kehidupan sosial.

Setiap dimensi dalam IMB 2025 tidak diukur secara tunggal, melainkan dioperasionalkan melalui tiga sub dimensi, yaitu cara pandang, sikap, dan praktik. Pembagian ini dimaksudkan untuk menangkap Moderasi Beragama mulai dari ranah pemahaman hingga ranah tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Ketiga subdimensi ini menjadi atribut pengukuran yang bersama-sama membentuk skor pada masing-masing dimensi Moderasi Beragama.

Indeks Moderasi Beragama (IMB) 2025 didasarkan pada empat pilar utama yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi Beragama, Anti Kekerasan dan Adaptif Terhadap Budaya Lokal



Gambar 2.1. Konsep Moderasi Beragama

Secara operasional, masing-masing dimensi dan sub dimensi didefinisikan sebagai berikut:

2.1.1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen Kebangsaan adalah sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan kesetiaan, kecintaan, dan dukungan penuh terhadap



bangsa dan negara Indonesia. Ini bukan sekadar pengakuan formal, melainkan perwujudan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

a. Cara Pandang

Cara pandang pada dimensi Komitmen Kebangsaan merujuk pada perspektif individu terhadap kesetiaan, kecintaan, dan dukungan penuh terhadap bangsa dan negara Indonesia. Subdimensi ini menggambarkan bagaimana individu memaknai dan memahami hubungan antara identitas keagamaan dan kebangsaan.

b. Sikap

Sikap pada dimensi Komitmen Kebangsaan merujuk pada kecenderungan respon individu yang menunjukkan kesetiaan, kecintaan dan dukungan penuh terhadap bangsa dan negara Indonesia. Subdimensi ini mencerminkan respon emosional dan evaluasi individu terhadap isu-isu kebangsaan.

c. Praktik

Praktik pada dimensi Komitmen Kebangsaan merujuk pada perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kesetiaan, kecintaan, dan dukungan penuh terhadap bangsa dan negara Indonesia. Sub dimensi ini menekankan tindakan konkret dalam konteks sosial dan kemasyarakatan.

2.1.2. Toleransi Beragama

Toleransi Beragama adalah sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama.

a. Cara Pandang

Cara pandang pada dimensi Toleransi Beragama merujuk pada perspektif individu terhadap perbedaan agama dan pentingnya saling menghargai antar pemeluk agama. Subdimensi ini menunjukkan penerimaan normatif terhadap keberagaman agama.

b. Sikap

Sikap pada dimensi Toleransi Beragama merujuk pada kecenderungan respon individu dalam menyikapi perbedaan agama. Subdimensi ini mencerminkan rasa nyaman atau penerimaan individu dalam interaksi sosial lintas agama.

c. Praktik

Praktik pada dimensi Toleransi Beragama merujuk pada perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama lain. Sub dimensi ini menekankan tindakan konkret dalam hubungan sosial.

2.1.3. Anti Kekerasan

Anti Kekerasan adalah penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara



fisik maupun psikis.

a. Cara Pandang

Cara pandang pada dimensi Anti Kekerasan merujuk pada perspektif individu terhadap penolakan tindakan kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Subdimensi ini menggambarkan penilaian individu terhadap legitimasi kekerasan.

b. Sikap

Sikap pada dimensi Anti Kekerasan merujuk pada kecenderungan respon individu yang menunjukkan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Subdimensi ini mencerminkan respon afektif terhadap wacana atau tindakan kekerasan.

c. Praktik

Praktik pada dimensi Anti Kekerasan merujuk pada perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kasih sayang, kedamaian, dan kemaslahatan, serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Sub dimensi ini menekankan tindakan nyata yang menjauhkan diri dari kekerasan.

2.1.4. Adaptif terhadap Budaya Lokal

Adaptif terhadap Budaya Lokal adalah penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan.

a. Cara Pandang

Cara pandang pada dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal merujuk pada perspektif individu terhadap tradisi dan budaya lokal dalam praktik keagamaan. Subdimensi ini menggambarkan cara individu memaknai hubungan antara agama dan budaya lokal.

b. Sikap

Sikap pada dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal merujuk pada kecenderungan respon individu dalam menyikapi tradisi dan budaya lokal dalam praktik keagamaan. Subdimensi ini mencerminkan penerimaan atau penolakan pada tingkat sikap.

c. Praktik

Praktik pada dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal merujuk pada perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menerima tradisi dan budaya lokal dalam praktik keagamaan, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan. Sub dimensi ini menekankan penerapan dalam kehidupan sosial.

Penentuan Indeks Moderasi Beragama berdasarkan 4 dimensi akan diukur oleh beberapa indikator pertanyaan di setiap dimensi. Total indikator pertanyaan di semua dimensi sebanyak 81 seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

2.2. Metode Penelitian

2.2.1. Teknik Sampel

Pengambilan sampel dalam Survei Indeks Moderasi Beragama



TABEL 2.1
DIMENSI, SUB DIMENSI, DAN INDIKATOR PERTANYAAN PENGUKURAN
INDEKS MODERASI BERAGAMA 2025

DIMENSI	PERTANYAAN
Komitmen Kebangsaan	Cara Pandang
	1. Pancasila sebagai dasar negara sudah final. 2. Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan ajaran agama saya. 3. Setiap gerakan politik untuk mengubah dasar negara Pancasila dengan ideologi lain adalah tindakan makar 4. Demokrasi adalah sistem bernegara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. 5. Setiap Kepala Daerah (Bupati, Wakilota, Gubernur) boleh berasal dari suku manapun. 6. Setiap Presiden boleh berasal dari suku manapun. 7. Setiap Kepala Daerah (Bupati, Wakilota, Gubernur) boleh berasal dari agama manapun. 8. Setiap Presiden boleh berasal dari agama manapun. 9. Setiap pemimpin publik boleh berasal dari kalangan perempuan. 10. Saya percaya bahwa mencintai tanah air, adalah bagian dari pengamalan nilai-nilai agama saya. 11. Saya memandang keragaman suku di Indonesia sebagai kekuatan, bukan ancaman. 12. Menjaga persatuan bangsa adalah kewajiban moral setiap warga negara. 13. Saya percaya bahwa identitas sebagai warga negara Indonesia sama pentingnya dengan identitas keagamaan saya.
	Sikap
	14. Saya menolak setiap tindakan yang mencoba mengganti dasar negara (Pancasila) dengan dalih agama maupun dalih apapun. 15. Saya merasa bangga sebagai Warga Negara Indonesia. 16. Saya menolak setiap tindakan yang mencoba merubah bentuk negara (NKRI) dengan dalih agama maupun dalih apapun. 17. Saya siap menolak paham yang ingin memecah belah bangsa. 18. Saya tetap mendukung jika ada pemimpin publik yang terpilih secara demokratis meskipun berasal dari suku yang berbeda. 19. Saya melihat identitas kebangsaan dan identitas keagamaan saya saling melengkapi.
	Praktik
	20. Saya selalu berusaha mentaati peraturan hukum yang ada. 21. Saya bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam setiap kesempatan. 22. Saya berpartisipasi dalam kegiatan gotong-royong masyarakat untuk mempererat persatuan. 23. Saya aktif menyebarkan informasi yang benar untuk melawan hoax yang memecah belah bangsa. 24. Saya ikut memperingati Hari Kemerdekaan. 25. Saya berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.



DIMENSI	PERTANYAAN
Toleransi Beragama	Cara Pandang
	1. Saya percaya bahwa setiap warga negara berhak memilih agama dan keyakinannya. 2. Saya memandang keberagaman agama di Indonesia sebagai kekuatan, bukan ancaman. 3. Saya percaya bahwa semua orang berhak beribadah menurut agama dan keyakinannya. 4. Toleransi antar umat beragama dianjurkan dalam ajaran agama saya. 5. Saya percaya bahwa hak kebebasan beragama harus dijaga oleh Negara dan Masyarakat.
	Sikap
	6. Saya menghormati orang lain yang agamanya berbeda dengan saya. 7. Saya merasa nyaman bergaul dengan orang yang berbeda agama. 8. Saya menghormati aliran keagamaan lain dalam agama saya (seperti Ahmadiyah, Syiah, Saksi Yehova, dll), meskipun ada perbedaan pendapat terkait tafsir teks keagamaan. 9. Saya merasa prihatin jika terjadi diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas. 10. Sebagai mayoritas melindungi minoritas adalah sebuah kewajiban. 11. Saya tidak menganggap sesat aliran keagamaan yang berbeda dengan pemahaman aliran keagamaan saya. 12. Saya siap hidup bertetangga dengan warga yang beragama lain. 13. Saya tidak mempermasalahkan kelompok agama lain yang melaksanakan doa bersama di rumah setelah mendapatkan izin. 14. Saya mendukung pendirian rumah ibadah agama lain di sekitar tempat tinggal saya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Praktik
	15. Saya bergaul dengan orang lain tanpa memandang agama. 16. Saya menghindari perkataan atau tindakan yang dapat menyinggung umat agama lain. 17. Saya akan menghadiri undangan keagamaan jika diundang oleh aliran/ormas keagamaan lain. 18. Saya mengucapkan terimakasih jika ada teman beragama lain, mengucapkan selamat saat hari raya agama saya. 19. Saya membantu orang lain yang sedang membutuhkan, tanpa melihat agamanya. 20. Saya tidak melarang acara keagamaan aliran/ormas keagamaan lain. 21. Saya tidak membubarkan acara keagamaan aliran/ormas keagamaan lain. 22. Saya tidak melarang acara keagamaan agama lain. 23. Saya tidak membubarkan acara keagamaan agama lain. 24. Saya tidak melakukan bullying/persekusi kepada penganut agama lain. 25. Saya tidak menyebar hoax dan ujaran kebencian untuk menjatuhkan aliran/ormas keagamaan lain. 26. Saya tidak menyebar hoax dan ujaran kebencian tentang agama lain.



DIMENSI	PERTANYAAN
Anti Kekerasan	Cara Pandang
	1. Cara kekerasan untuk menegakan ajaran agama tidak dibenarkan. 2. Saya percaya bahwa konflik agama harus diselesaikan dengan cara dialog/musyawarah. 3. Merusak rumah ibadah agama lain adalah tidak dibenarkan. 4. Forum dialog antar agama dibutuhkan untuk menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama. 5. Saya menolak setiap paham yang mengusung kekerasan masuk ke Indonesia.
	Sikap
	6. Saya tidak mendukung cara-cara kekerasan seperti sweeping untuk menegakkan ajaran agama. 7. Saya mendukung dialog damai (musyawarah) untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama. 8. Saya mendukung penangkapan kelompok radikal-teroris di Indonesia.
	Praktik
	9. Saya menghindari menjadi simpatisan atau anggota kelompok yang mendorong cara-cara kekerasan. 10. Saya tidak pernah menyebar hoaks/ujaran kebencian secara langsung maupun secara daring. 11. Saya menghindari pertengkaran/konflik dengan aliran/ormas keagamaan yang berbeda. 12. Saya menghindari pertengkaran/konflik dengan umat agama lain. 13. Saya menghindari ikut serta dalam aksi massa yang berpotensi memicu kekerasan terhadap umat (kelompok) agama lain. 14. Saya menjaga perilaku saat berada di dekat tempat ibadah agama lain. 15. Saya tidak ikut perusakan simbol-simbol (rumah ibadah, dll) keagamaan agama lain.



DIMENSI	PERTANYAAN
Adaptif terhadap Budaya Lokal	Cara Pandang
	1. Ajaran agama dan tradisi lokal tidak harus dipertentangkan. 2. Penyesuaian praktik agama dengan kondisi budaya lokal adalah bentuk kebijaksanaan, bukan penyimpangan. 3. Tradisi keagamaan yang berakulturasi dengan budaya lokal harus dipertahankan. 4. Simbol-simbol budaya lokal tidak otomatis bertentangan dengan agama saya. 5. Budaya lokal dapat menjadi jembatan dalam mempererat persaudaraan antar umat beragama. 6. Tradisi adat (seperti Sedekah Bumi, Sedekah Laut, Nyadran, dll) merupakan wujud rasa syukur terhadap lingkungan tidak bertentangan dengan ajaran agama.
	Sikap
	7. Saya yakin bahwa budaya lokal dapat menjadi media dakwah dan pendidikan moral. 8. Saya menghormati praktik (ritual) keagamaan masyarakat setempat (seperti Muharram, Suro, Grebeg Maulid, dll). 9. Perayaan atau kegiatan tradisi dan budaya lokal (seperti Sedekah Bumi, Sedekah Laut, Nyadran, dll) yang sudah hidup dan ada sejak turun temurun tidak boleh dibubarkan secara sepihak. 10. Saya menghindari sikap merendahkan atau mengejek tradisi lokal. 11. Saya bangga menggunakan baju/pakaian adat.
	Praktik
	12. Saya bersedia berpartisipasi dalam kegiatan budaya/tradisi lokal. 13. Saya tidak pernah ikut dalam membubarkan kegiatan masyarakat yang mengandung nilai tradisi/budaya. 14. Saya mengikuti tata cara berpakaian dan berperilaku sesuai tradisi setempat selama tidak bertentangan dengan agama/keyakinan saya. 15. Saya ikut mempromosikan tradisi/budaya lokal.



Survei IMB 2025
melibatkan 2.850
responden yang dibagi
dalam dua kelompok
responden, yaitu
Masyarakat Umum dan
Masyarakat Pendidik.

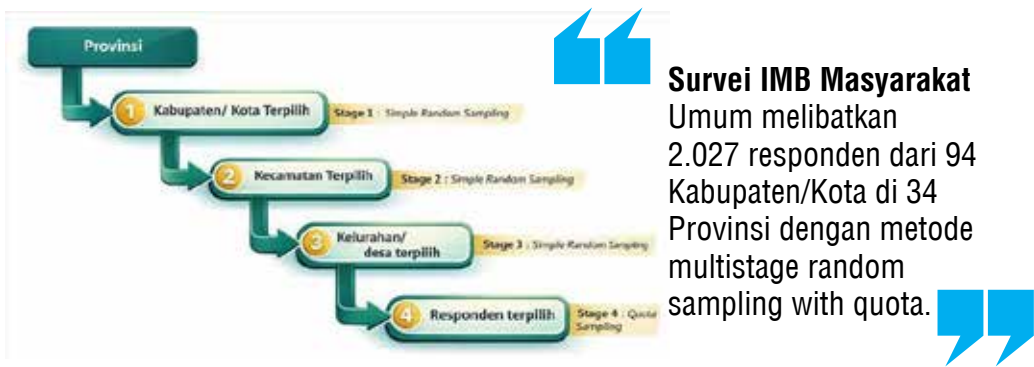


(IMB) Tahun 2025 dilakukan terhadap dua kelompok responden, yaitu Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik. Total responden yang terlibat dalam survei ini berjumlah 2.850 responden, yang terdiri dari 2.027 Masyarakat Umum dan 823 Masyarakat Pendidik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview). Metode pengambilan sampel antara Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik berbeda karena karakteristik sampel yang berbeda.

Pemisahan responden ke dalam kelompok Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik dilakukan untuk menangkap perbedaan peran sosial dan konteks pembentukan nilai moderasi beragama. Masyarakat Umum merepresentasikan pengalaman dan praktik moderasi beragama dalam kehidupan sosial sehari-hari, sedangkan Masyarakat Pendidik diposisikan sebagai kelompok strategis yang berperan dalam proses pendidikan, transmisi nilai, serta pembentukan cara pandang, sikap, dan praktik moderasi beragama di ruang institusional dan publik.

Metode pengambilan sampel untuk Masyarakat Umum menggunakan pendekatan Multistage Random Sampling with quota. Metode multistage random sampling digunakan untuk menjamin keterwakilan wilayah secara geografis, sedangkan penerapan quota sampling pada tahap akhir tidak dimaksudkan untuk menghilangkan prinsip acak dalam pengambilan sampel, melainkan sebagai mekanisme pengendalian agar komposisi responden mencerminkan keragaman sosial masyarakat.

Proses pemilihan responden dilakukan secara bertahap mulai dari wilayah administrasi hingga individu. Dimulai dari Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT hingga responden terpilih yang ditunjukkan pada Gambar 2. Pada setiap tingkatan (stage) dilakukan pengacakan menggunakan simple random sampling. Pada tingkatan terakhir yaitu RT, setiap RT yang terpilih hanya diambil 2 responden dengan memperhatikan kuota usia, jenis kelamin, status ekonomi, dan agama.



Gambar 2.2 Tingkat Pengambilan Sampel Masyarakat Umum

Pengumpulan data Masyarakat Umum dilakukan pada 24 September 2025 – 6 Oktober 2025 di 34 Provinsi. Jumlah sampel 2.027 responden yang tersebar di 94 Kabupaten/Kota, 236 Kecamatan dan 465 Kelurahan/Desa. Responden diambil secara proporsional di setiap Provinsi dengan usia 18 – 60 tahun. Dengan jumlah sampel tersebut, survei Masyarakat Umum memiliki margin of error sebesar 2,22%. Margin of error ini menunjukkan tingkat ketelitian estimasi pada level agregat nasional. Distribusi sampel Masyarakat Umum berdasarkan Provinsi ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Distribusi Sampel Masyarakat Umum Berdasarkan Provinsi

Metode pengambilan sampel untuk Masyarakat Pendidik menggunakan pendekatan metode Cluster Random Sampling with quota. Pendekatan cluster sampling digunakan karena populasi Masyarakat Pendidik memiliki karakteristik yang terkelompok secara institusional, sehingga pemilihan lembaga pendidikan sebagai unit kluster dinilai lebih efisien dan relevan secara metodologis.

Penentuan sampel diambil berdasarkan kategori pendidik yaitu Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Proses pengambilan sampel dilakukan bertahap di setiap Provinsi dimulai dari Kota/Kabupaten, Lembaga Pendidikan hingga responden terpilih yang ditunjukkan pada Gambar 4. Responden terpilih diambil berdasarkan kuota yang sudah ditentukan.



Survei IMB Masyarakat Pendidik melibatkan 823 responden dari 34 Provinsi dengan metode cluster random sampling with quota.

Gambar 2.4 Tingkat Pengambilan Sampel Masyarakat Pendidik

Pengumpulan data Masyarakat Pendidik dilakukan pada 24 September 2025 - Oktober 2025 di 34 Provinsi. Jumlah sampel 823 responden tersebar di setiap provinsi dengan rentang usia 18 – 60 tahun berdasarkan kuota sampel yang terdiri dari 620 Guru, 151 Tenaga Kependidikan dan 52 Dosen. Dengan jumlah sampel tersebut, survei Masyarakat Pendidik memiliki margin of error sebesar 3,49%. Perbedaan margin of error antara Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel dan karakteristik populasi masing – masing kelompok responden. Distribusi sampel Masyarakat Pendidik berdasarkan Provinsi ditunjukkan pada Gambar 5.



Perbedaan margin of error antara Masyarakat Umum dan Masyarakat Pendidik disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel dan karakteristik populasi masing-masing kelompok responden.

Gambar 2.5 Distribusi Sampel Masyarakat Pendidik Berdasarkan Provinsi

2.2.2. Penentuan Level Indeks

Level Indeks Moderasi Beragama diadopsi dari klasifikasi Status Pembangunan Manusia oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Terdapat 4 klasifikasi level indeks yang diadopsi untuk Indeks Moderasi Beragama 2025, level indeks tersebut adalah sebagai berikut.



Klasifikasi level indeks dimaksudkan sebagai representasi posisi relatif nilai indeks dalam skala pengukuran yang sama. Level indeks ini juga digunakan sebagai dasar untuk membaca kecenderungan umum dan menentukan prioritas kebijakan penguatan Moderasi Beragama, serta perlu dibaca bersama dengan analisis dimensi dan sub dimensi.

2.3. Validitas, Reliabilitas dan Kontrol Kualitas



Kontrol kualitas pada seluruh tahapan survei dilakukan untuk menjaga integritas proses pengumpulan data dan memastikan bahwa hasil survei merepresentasikan kondisi populasi secara akurat.



Proses survei hingga analisis data harus melalui tahapan proses kontrol kualitas (quality control). Tujuan proses tersebut untuk memastikan proses survei dilakukan secara benar dan ilmiah serta untuk menjaga kualitas data sehingga hasil analisis bisa merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Berikut adalah beberapa tahapan proses kontrol kualitas (quality control) yang dilakukan pada survei Indeks Moderasi Beragama 2025.

2.3.1. Pra Survei

Tahapan ini diawali dengan pengujian instrumen survei dengan melaksanakan trial survey. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 100 responden. Hasil data dari 100 responden dilakukan uji statistik berupa uji reliabilitas dan validitas. Selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian jawaban serta kemudahan responden dalam menjawab pertanyaan dari instrumen yang diberikan. Pada tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator pertanyaan mampu mengukur konsep moderasi beragama secara konsisten dan dipahami dengan baik oleh responden dari berbagai latar belakang. Hasil tahap ini digunakan sebagai dasar penyempurnaan instrumen agar siap digunakan pada pelaksanaan survei utama di lapangan.

2.3.2. Survei

Proses Kontrol Kualitas pada pelaksanaan survei dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu dilakukan proses Spotcheck di beberapa lokasi terpilih dengan tujuan melakukan pengawasan langsung terhadap proses wawancara, memastikan prosedur survei dijalankan sesuai pedoman, serta melakukan pencatatan dan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

Tahap kedua yaitu melakukan call back terhadap data yang sudah terkumpul. Proses call back dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali sekitar



10% - 30% dari total responden melalui beberapa pertanyaan kunci untuk memastikan kebenaran proses wawancara dan konsistensi jawaban responden. Kedua tahap ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan pengumpulan data, baik bersifat teknis maupun non-teknis, serta untuk menjaga integritas data survei.

2.3.3. Pasca Survei

Proses Kontrol Kualitas pasca survei dengan melakukan pengujian Reliabilitas dan Validitas terhadap semua data yang sudah terkumpul. Uji Reliabilitas diukur menggunakan derajat Cronbach Alpha, dan uji validitas diukur menggunakan Pearson Correlation.

Hasil uji reliabilitas dan validitas sebagaimana disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh instrumen pertanyaan pada setiap dimensi Indeks Moderasi Beragama, baik Masyarakat Umum maupun Masyarakat Pendidik, dinyatakan valid dan reliabel

TABEL 2.2
LEVEL INDEKS MODERASI BERAGAMA 2025

NILAI INDEKS	LEVEL INDEKS
≥ 80	Sangat Tinggi
$70 \leq \text{IMB} < 80$	Tinggi
$60 \leq \text{IMB} < 70$	Sedang
< 60	Rendah



TABEL 2.3
HASIL UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS MASYARAKAT UMUM

DIMENSI	INDIKATOR	KOEFISIEN RELIABILITAS	NILAI VALIDITAS	P-VALUE
Komitmen Kebangsaan	1	0,92	0,60	0,00
	2		0,67	0,00
	3		0,58	0,00
	4		0,67	0,00
	5		0,71	0,00
	6		0,72	0,00
	7		0,62	0,00
	8		0,56	0,00
	9		0,55	0,00
	10		0,71	0,00
	11		0,70	0,00
	12		0,68	0,00
	13		0,67	0,00
	14		0,71	0,00
	15		0,65	0,00
	16		0,73	0,00
	17		0,72	0,00
	18		0,69	0,00
	19		0,68	0,00
	20		0,70	0,00
	21		0,72	0,00
	22		0,72	0,00
	23		0,62	0,00
	24		0,73	0,00
	25		0,66	0,00



DIMENSI	INDIKATOR	KOEFISIEN RELIABILITAS	NILAI VALIDITAS	P-VALUE
Toleransi Beragama	1	0,90	0,76	0,00
	2		0,75	0,00
	3		0,77	0,00
	4		0,75	0,00
	5		0,76	0,00
	6		0,64	0,00
	7		0,72	0,00
	8		0,62	0,00
	9		0,71	0,00
	10		0,72	0,00
	11		0,70	0,00
	12		0,74	0,00
	13		0,71	0,00
	14		0,71	0,00
	15		0,72	0,00
	16		0,73	0,00
	17		0,56	0,00
	18		0,73	0,00
	19		0,71	0,00
	20		0,75	0,00
	21		0,77	0,00
	22		0,81	0,00
	23		0,78	0,00
	24		0,77	0,00
	25		0,76	0,00
	26		0,75	0,00
Anti Kekerasan	1	0,93	0,73	0,00



DIMENSI	INDIKATOR	KOEFISIEN RELIABILITAS	NILAI VALIDITAS	P-VALUE
	2		0,72	0,00
	3		0,72	0,00
	4		0,74	0,00
	5		0,73	0,00
	6		0,69	0,00
	7		0,68	0,00
	8		0,65	0,00
	9		0,76	0,00
	10		0,77	0,00
	11		0,79	0,00
	12		0,78	0,00
	13		0,77	0,00
	14		0,76	0,00
	15		0,78	0,00
Adaptif Terhadap Budaya Lokal	1	0,85	0,72	0,00
	2		0,75	0,00
	3		0,73	0,00
	4		0,75	0,00
	5		0,71	0,00
	6		0,65	0,00
	7		0,70	0,00
	8		0,70	0,00
	9		0,71	0,00
	10		0,68	0,00
	11		0,68	0,00
	12		0,72	0,00
	13		0,68	0,00
	14		0,70	0,00
	15		0,64	0,00



TABEL 2.4
HASIL UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS MASYARAKAT PENDIDIK

Dimensi	Indikator	Koefisien Reliabilitas	Nilai Validitas	P-value
Komitmen Kebangsaan	1	0,93	0,68	0,00
	2		0,72	0,00
	3		0,59	0,00
	4		0,70	0,00
	5		0,76	0,00
	6		0,76	0,00
	7		0,68	0,00
	8		0,60	0,00
	9		0,64	0,00
	10		0,74	0,00
	11		0,75	0,00
	12		0,73	0,00
	13		0,67	0,00
	14		0,69	0,00
	15		0,68	0,00
	16		0,78	0,00
	17		0,79	0,00
	18		0,76	0,00
	19		0,76	0,00
	20		0,77	0,00
	21		0,79	0,00
	22		0,79	0,00
	23		0,69	0,00
	24		0,78	0,00
	25		0,77	0,00
Toleransi Beragama	1	0,90	0,68	0,00
	2		0,72	0,00
	3		0,59	0,00
	4		0,70	0,00
	5		0,76	0,00
	6		0,67	0,00
	7		0,76	0,00
	8		0,57	0,00
	9		0,74	0,00



Dimensi	Indikator	Koefisien Reliabilitas	Nilai Validitas	P-value
	10		0,74	0,00
	11		0,68	0,00
	12		0,76	0,00
	13		0,74	0,00
	14		0,71	0,00
	15		0,78	0,00
	16		0,75	0,00
	17		0,55	0,00
	18		0,76	0,00
	19		0,79	0,00
	20		0,80	0,00
	21		0,82	0,00
	22		0,81	0,00
	23		0,81	0,00
	24		0,81	0,00
	25		0,80	0,00
	26		0,78	0,00
Anti Kekerasan	1	0,93	0,73	0,00
	2		0,80	0,00
	3		0,79	0,00
	4		0,77	0,00
	5		0,77	0,00
	6		0,75	0,00
	7		0,75	0,00
	8		0,73	0,00
	9		0,79	0,00
	10		0,84	0,00
	11		0,87	0,00
	12		0,85	0,00
	13		0,84	0,00
	14		0,84	0,00
	15		0,84	0,00



Dimensi	Indikator	Koefisien Reliabilitas	Nilai Validitas	P-value
Adaptif Terhadap Budaya Lokal	1	0,85	0,76	0,00
	2		0,80	0,00
	3		0,80	0,00
	4		0,77	0,00
	5		0,76	0,00
	6		0,65	0,00
	7		0,76	0,00
	8		0,74	0,00
	9		0,73	0,00
	10		0,73	0,00
	11		0,73	0,00
	12		0,78	0,00
	13		0,75	0,00
	14		0,77	0,00
	15		0,79	0,00

Dimensi	Indikator	Koefisien Reliabilitas	Nilai Validitas	P-value
	2		0,80	0,00
	3		0,80	0,00
	4		0,77	0,00
	5		0,76	0,00
	6		0,65	0,00
	7		0,76	0,00
	8		0,74	0,00
	9		0,73	0,00
	10		0,73	0,00
	11		0,73	0,00
	12		0,78	0,00
	13		0,75	0,00
	14		0,77	0,00
	15		0,79	0,00

INDONESIA
T H N 2 0 2 5
M O D E R A S I
B E R A G A M A

BAB III

POTRET INDEKS MODERASI BERAGAMA (IMB) MASYARAKAT UMUM

3.1. Profil Demografi Responden Masyarakat Umum

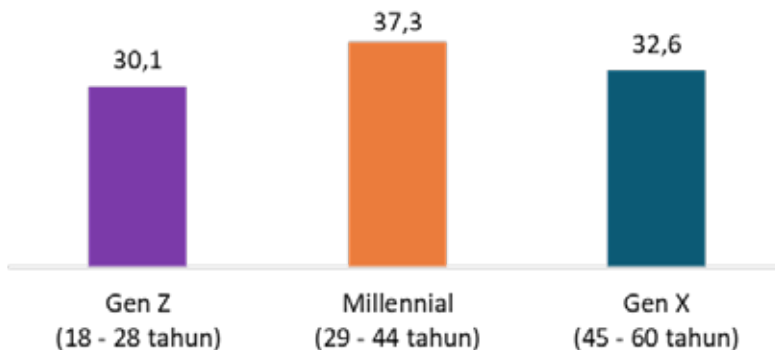
Profil responden pada survei indeks moderasi beragama tahun 2025 menunjukkan komposisi demografis yang merepresentasikan struktur penduduk Indonesia secara umum. Sebaran responden dari aspek jenis kelamin, generasi usia, maupun latar belakang agama tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dan relatif seimbang dengan karakteristik demografi nasional. Kondisi ini merepresentasikan bahwa data survei indeks moderasi beragama 2025 dihimpun dari kelompok masyarakat yang beragam sehingga mampu menggambarkan konsep dan nilai moderasi beragama yang lebih utuh dan objektif.

Gambar 3.1
Presentasi distribusi
responden
berdasarkan jenis
kelamin



Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin pada survei ini terbagi secara proporsional, dengan jumlah responden laki-laki sebesar 50,1% dan perempuan sebesar 49,9%. Dengan demikian, keseimbangan ini dapat memperkuat legitimasi dan keterwakilan hasil indeks moderasi beragama.

"50,1% responden adalah laki-laki, 49,9%" lainnya adalah Perempuan"



Gambar 3.2 Jumlah sebaran responden menurut kelompok generasi usia

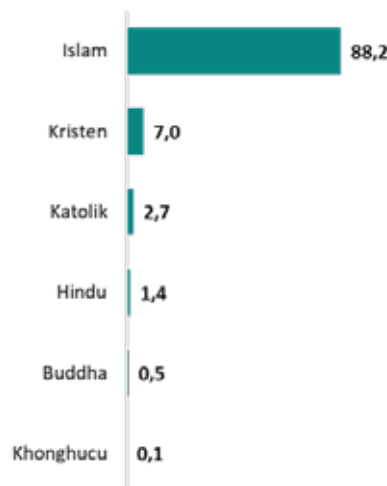


Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan Generasi X sebagai penduduk yang lahir pada rentang tahun 1965-1980, Generasi Milenial pada periode tahun 1981-1996, dan Generasi Z pada periode 1997-2012. Kerangka klasifikasi ini kemudian digunakan sebagai dasar pengelompokan responden pada survei indeks moderasi beragama tahun 2025 untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan standar statistik nasional.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, responden survei indeks moderasi beragama 2025 berasal dari masyarakat umum yang berusia 18 tahun hingga 60 tahun yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga generasi usia. Komposisi responden menurut generasi ini menunjukkan sebaran generasi usia yang relatif merata, dengan generasi milenial sebagai kelompok terbanyak sebagai responden yaitu sebesar 37,3%, diikuti oleh generasi X sebanyak 32,6%, dan generasi Z sebesar 30,1%. Jumlah distribusi responden yang seimbang ini merepresentasikan keterwakilan lintas generasi dalam survei indeks moderasi beragama tahun 2025.

“Generasi milenial merupakan kelompok usia dengan jumlah responden terbanyak dalam survei IMB 2025”

Berdasarkan data dari Satu Data Kementerian Agama, proporsi penduduk nasional menurut latar belakang agama yang dianut terdiri atas penganut agama Islam sebanyak 87,2%, Kristen 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Khonghucu sebesar 0,05%. Dalam survei indeks moderasi beragama 2025, komposisi responden berdasarkan agama disusun selaras dengan struktur demografis penduduk Indonesia berdasarkan latar belakang agama yang dianut.



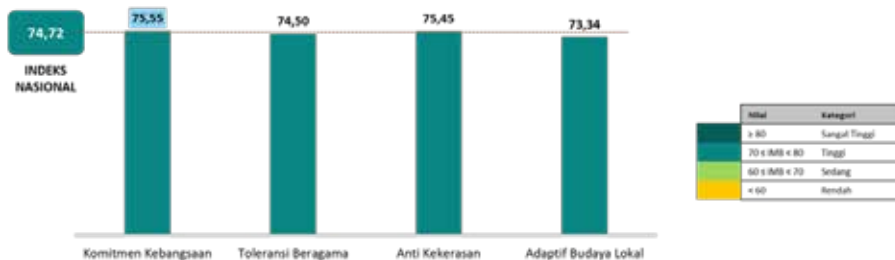
Gambar 3.3 Jumlah komposisi responden menurut latar belakang agama

Responden dalam survei indeks moderasi beragama tahun 2025 ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan latar belakang berbagai agama. Responden didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam sebagai mayoritas yaitu sebesar 88,2%, diikuti oleh responden beragama Kristen sebanyak 7%, Katolik 2,7%, Hindu 1,4%, Buddha 0,5%, dan Konghucu sebesar 0,1%. Sebaran ini menunjukkan keterwakilan yang memadai dari seluruh umat beragama di Indonesia sekaligus menegaskan bahwa hasil survei indeks moderasi beragama 2025 dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat pada skala nasional secara proporsional dan kredibel.

"Komposisi responden lintas agama memperkuat validitas dan representasi hasil Indeks Moderasi Beragama Tahun 2025"

3.2. Potret IMB Nasional Masyarakat Umum

Berdasarkan hasil survei indeks moderasi beragama tahun 2025, secara nasional skor indeks moderasi beragama tercatat sebesar 74,72 yang masuk dalam kategori "Tinggi". Skor ini merefleksikan kondisi moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat yang relatif kuat dan stabil. Capaian ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai dasar moderasi beragama telah tumbuh dan diimplementasikan secara luas oleh masyarakat.



Gambar 3.4 Hasil Skor Indeks Moderasi Beragama Nasional Berdasarkan Dimensi

Berdasarkan hasil indeks moderasi beragama tahun 2025, seluruh dimensi pengukuran mencatatkan skor pada kategori tinggi, meskipun perbedaan capaian antar dimensi mengindikasikan adanya ruang-ruang yang perlu perbaikan. Dimensi komitmen kebangsaan mencatatkan skor tertinggi dibandingkan dimensi yang lain, yaitu sebesar 75,55. Skor ini menunjukkan keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan konsensus nasional cenderung kuat. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal strategi untuk menjaga persatuan nasional dan mencegah berkembangnya paham keagamaan yang bertentangan dengan prinsip



kebangsaan.

Kemudian pada dimensi toleransi beragama memperoleh skor 74,50 yang merepresentasikan bahwa mayoritas masyarakat telah memiliki perspektif yang relatif terbuka dan penerimaan terhadap keberagaman keyakinan di tengah masyarakat. Dimensi anti kekerasan juga mendapatkan skor tinggi yaitu 75,45. Skor tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan disparitas pandangan dan keyakinan melalui cara-cara damai dan dialogis, serta meningkatnya kesadaran publik terhadap dampak negatif kekerasan baik secara sosial, hukum, maupun kemanusiaan.

Selanjutnya, pada dimensi adaptif terhadap budaya lokal mencatatkan nilai sebesar 73,34. Dimensi ini menjadi dimensi yang mencatatkan skor terendah dibandingkan dimensi lainnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki tingkat penerimaan yang cukup baik terhadap ragam ekspresi budaya lokal dalam kehidupan beragama, termasuk tradisi, kearifan lokal, dan praktik sosial yang ada. Namun demikian, dari sisi lain skor ini juga mencerminkan adanya kecenderungan penafsiran keagamaan yang kaku sehingga dapat menyebabkan resistensi terhadap budaya yang dianggap berbeda dari nilai agama yang dianut.

Perbedaan capaian antar dimensi tersebut memberikan gambaran bahwa meskipun kondisi praktik dan sikap moderasi beragama secara umum sudah baik, namun masih menyisakan ruang untuk penguatan khususnya pada aspek adaptasi dan penerimaan terhadap keragaman budaya lokal dalam praktik keberagamaan.

“74,72 merupakan skor indeks moderasi beragama tahun 2025 dan berada pada kategori tinggi”

3.3. Potret Empat Pilar IMB Masyarakat Umum

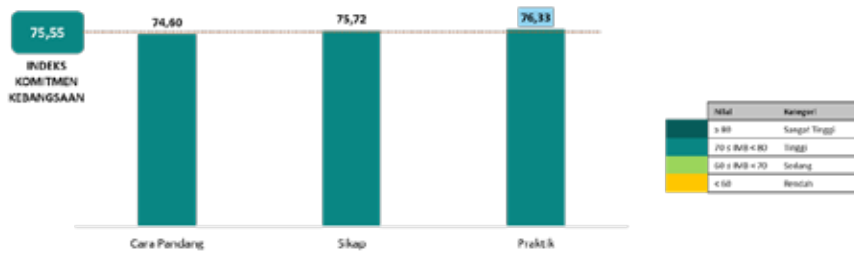
3.3.1 Komitmen Kebangsaan

Pada dimensi Komitmen Kebangsaan, sub dimensi praktik menempati capaian tertinggi dengan skor 76,33 yang menandakan bahwa nilai-nilai kebangsaan telah terimplementasi secara nyata dalam perilaku masyarakat, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Subdimensi Sikap mencatat skor 75,72 mencerminkan kecenderungan afektif masyarakat untuk menerima, menghargai, dan menjaga prinsip-prinsip kebangsaan. Adapun subdimensi Cara Pandang memperoleh skor 74,60, relatif lebih rendah dibandingkan dengan subdimensi lainnya yang mengindikasikan perlunya penguatan berkelanjutan terhadap internalisasi nilai kebangsaan pada ranah kognitif.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa komitmen kebangsaan masyarakat telah mengakar kuat, terutama pada tataran praksis. Praktik kebangsaan yang dilakukan masyarakat

menunjukkan tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konstruksi cara pandang dan sikap, sehingga nilai-nilai kebangsaan telah hidup dan berfungsi dalam realitas sosial, meskipun belum sepenuhnya terinternalisasi secara reflektif.

“75,55 skor Indeks Komitmen Kebangsaan yang mencerminkan fondasi kebangsaan masyarakat umum yang relatif kuat.”



Gambar 3.5 IMB Masyarakat Umum Dimensi Komitmen Kebangsaan

Dari lima atribut pada Dimensi Komitmen Kebangsaan yang mencakup aspek cara pandang, sikap, dan praktik dengan capaian nilai terendah, dapat diidentifikasi sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian kebijakan lebih lanjut, antara lain:



Gambar 3.6 Lima Atribut Dimensi Komitmen Kebangsaan dengan Nilai Terendah

- **Penerimaan terhadap pemimpin publik lintas agama masih menjadi atribut paling resisten**



Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya pandangan keagamaan yang eksklusif dalam sebagian masyarakat, di mana kepemimpinan politik kerap dikaitkan dengan identitas agama. Agama masih diposisikan sebagai basis legitimasi politik di ruang publik, sehingga pertimbangan kompetensi, kapasitas, dan integritas pemimpin belum sepenuhnya menjadi faktor utama dalam penerimaan sosial.

- **Resistensi penerimaan pemimpin publik lintas agama kuat di tingkat nasional (presiden) dibandingkan lokal (bupati/gubernur)**

Temuan menunjukkan bahwa penerimaan terhadap pemimpin lintas agama cenderung lebih rendah pada jabatan nasional seperti presiden, dibandingkan pada kepemimpinan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang kekuasaan, semakin kuat pula ekspektasi simbolik dan identitas keagamaan yang dilekatkan pada figur pemimpin.

- **Rendahnya penerimaan terhadap pemimpin perempuan menegaskan masih kuatnya patriarki religius**

Tafsir keagamaan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam kepemimpinan publik masih berpengaruh signifikan. Keterbatasan penerimaan tersebut berdampak pada lambatnya transformasi kesetaraan gender dalam politik, padahal demokrasi yang matang menuntut kepemimpinan yang inklusif dan berbasis kompetensi.

- **Praktik penolakan terhadap hoaks menunjukkan adanya kesadaran publik terhadap ancaman disinformasi**

Meskipun berada pada kelompok atribut dengan nilai relatif lebih rendah, temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki tingkat kewaspadaan terhadap bahaya informasi palsu. Namun demikian, penguatan literasi digital tetap perlu dilakukan secara konsisten dan terstruktur untuk memastikan daya tahan masyarakat terhadap disinformasi semakin kuat dan merata.

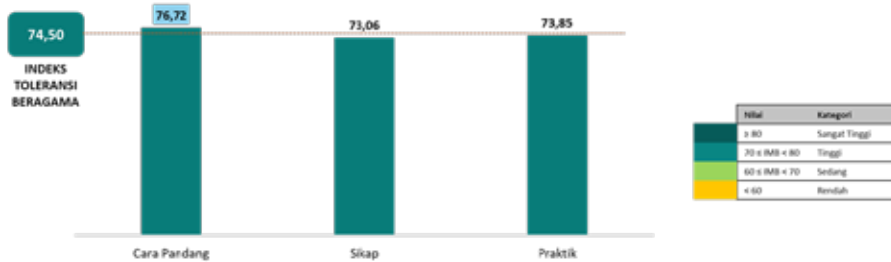
3.3.2. Toleransi Beragama

Pada Dimensi Toleransi Beragama, hasil pengukuran memperlihatkan dinamika yang menarik antara cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat. Subdimensi Cara Pandang mencatat skor tertinggi sebesar 76,72 yang menunjukkan bahwa secara konseptual masyarakat relatif telah menerima prinsip toleransi sebagai nilai bersama dalam kehidupan beragama.

Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya terkonversi secara konsisten ke dalam ranah afektif dan praksis. Subdimensi Praktik memperoleh skor 73,85 sementara Subdimensi Sikap berada pada skor 73,06. Perbedaan capaian ini mengindikasikan bahwa penerimaan toleransi pada tataran gagasan masih lebih tinggi dibandingkan dengan kesiapan emosional dan keberanian bertindak nyata.

Kondisi ini mengisyaratkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan implementasi toleransi dalam kehidupan sosial. Toleransi cenderung diterima sebagai nilai ideal, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sikap dan perilaku masyarakat ketika dihadapkan pada perbedaan keyakinan di ruang publik.

“74,50 skor Indeks Toleransi Beragama yang menunjukkan tingkat toleransi yang relatif baik, namun masih memerlukan penguatan pada sikap dan praktik.”



Gambar 3.7 IMB Masyarakat Umum Dimensi Toleransi Beragama

Dari lima atribut pada Dimensi Toleransi Beragama yang mencakup aspek cara pandang, sikap, dan praktik dengan capaian nilai terendah, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar dalam penguatan toleransi beragama khususnya pada ranah implementatif, antara lain:

- Kecenderungan toleransi pasif masih lebih dominan dibandingkan toleransi aktif

Hal ini tercermin dari rendahnya nilai pada atribut kesediaan menghadiri undangan aliran/ormas keagamaan lain yang hanya mencapai 69,29. Temuan ini menunjukkan bahwa toleransi internal umat beragama lebih banyak terhenti pada level penerimaan pasif, tanpa diikuti oleh keterlibatan sosial yang bersifat aktif dan inklusif.



Gambar 3.8 Lima Atribut Dimensi Toleransi dengan Nilai Terendah



- **Masih kuatnya potensi eksklusivisme internal dalam komunitas keagamaan**

Terlihat pada nilai atribut penerimaan terhadap aliran keagamaan lain dalam agamanya berada pada angka 71,11 yang mengindikasikan risiko marginalisasi sosial terhadap kelompok minoritas intra-agama. Temuan ini diperkuat oleh nilai atribut tidak menganggap sesat aliran keagamaan yang berbeda pemahaman aliran keagamaannya sebesar 72,36 menunjukkan bahwa batas penerimaan teologis masih relatif sempit.

- **Fenomena NIMBY Syndrome (Not in My Backyard) masih dijumpai dalam praktik toleransi**

Masyarakat cenderung menerima pluralitas secara normatif, namun menunjukkan resistensi ketika nilai tersebut diimplementasikan di ruang terdekat. Hal ini tercermin dari nilai atribut dukungan terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di sekitar tempat tinggal sesuai peraturan yang berlaku hanya mencapai 71,21, sehingga masih adanya jarak antara penerimaan ideologis dan kesiapan sosial.

- **Masih terdapat potensi resistensi terhadap aktivitas ibadah kelompok keagamaan yang berbeda**

Temuan ini mengindikasikan bahwa kebebasan menjalankan ibadah bagi kelompok lain belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari hak sipil yang setara. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan narasi toleransi yang tidak hanya menekankan koeksistensi, tetapi juga jaminan ruang aman bagi praktik keagamaan yang beragam.

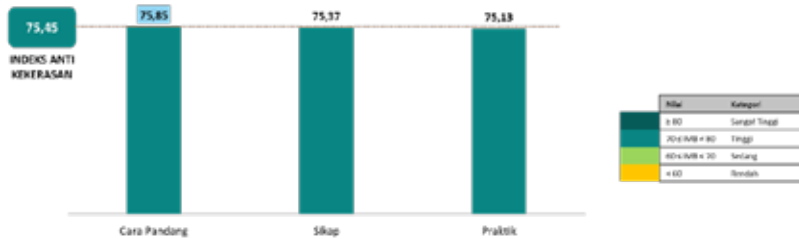
3.3.3. Anti Kekerasan

Pada Dimensi Anti Kekerasan, hasil pengukuran menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan merata pada seluruh subdimensi. Kondisi ini mencerminkan tingkat resistensi masyarakat yang cukup kuat terhadap kekerasan yang mengatasnamakan agama. Subdimensi Cara Pandang memperoleh nilai tertinggi sebesar 75,85 yang mengindikasikan bahwa secara kognitif masyarakat telah memiliki pemahaman yang jelas dan tegas dalam menolak legitimasi kekerasan berbasis keagamaan.

Subdimensi Sikap mencatat skor 75,37 menggambarkan kecenderungan afektif masyarakat yang tidak mentoleransi penggunaan kekerasan dalam ekspresi keberagaman. Sementara itu, Subdimensi Praktik memperoleh skor 75,13 yang menunjukkan penolakan terhadap kekerasan tidak hanya berhenti pada tataran pemikiran dan sikap, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial sehari-hari.

Kedekatan capaian nilai antar subdimensi menandakan adanya konsistensi internal dalam Dimensi Anti Kekerasan, di mana cara pandang, sikap, dan praktik masyarakat bergerak searah. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai anti kekerasan telah relatif terinternalisasi sebagai norma sosial bersama, sehingga berfungsi sebagai faktor protektif terhadap berkembangnya ekstremisme dan radikalisme berbasis agama di ruang publik.

75,45 skor Indeks Anti Kekerasan yang mencerminkan daya tahan sosial masyarakat cukup kuat terhadap kekerasan berbasis agama.



Gambar 3.9 IMB Masyarakat Umum Dimensi Anti Kekerasan

Dari lima atribut pada Dimensi Anti Kekerasan yang mencakup aspek cara pandang, sikap, dan praktik dengan capaian nilai terendah, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah kerentanan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penguatan moderasi beragama antara lain:

- **Sikap anti kekerasan masyarakat berada pada kategori baik, namun belum sepenuhnya kokoh**

Meskipun penolakan terhadap kekerasan atas nama agama telah menjadi kecenderungan umum, sebagian masyarakat masih menyimpan potensi frustrasi kolektif. Dalam situasi sosial tertentu, kondisi ini akan berisiko dimobilisasi menjadi intoleransi, tekanan sosial, atau bentuk kekerasan simbolik.

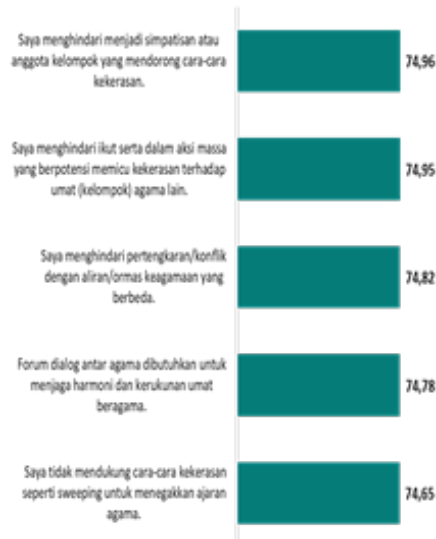
- **Terdapat ambivalensi antara penolakan normatif dan respons dalam praktik sosial**

Sebagian masyarakat menolak kekerasan secara prinsip, namun dalam dinamika sosial sehari-hari, namun resistensi terhadap kelompok yang berbeda masih berpotensi muncul terutama ketika isu-isu sensitif keagamaan menjadi pemicu. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai anti kekerasan belum sepenuhnya konsisten di seluruh konteks sosial.

- **Forum dialog antaragama belum dimaknai sebagai kebutuhan sosial yang mendasar**

Rendahnya capaian skor pada atribut terkait forum dialog antaragama mengindikasikan bahwa komunikasi lintas iman dan lintas organisasi keagamaan belum menjadi praktik yang mengakar. Dialog masih sering dipersepsikan sebagai kegiatan elitis atau formalitas, belum sebagai ruang interaksi yang hidup dan partisipatif.

- **Masih terdapat zona abu-abu (grey zone) dalam kesadaran anti kekerasan**



Gambar 3.10 Lima Atribut Dimensi Anti Kekerasan dengan Nilai Terendah

Sebagian masyarakat mungkin tidak terlibat langsung dalam tindakan kekerasan atau ujaran kebencian, namun juga belum menunjukkan sikap penolakan aktif terhadap praktik tersebut. Sikap pasif ini berpotensi melemahkan upaya kolektif dalam mencegah kekerasan berbasis agama.

3.3.4. Adaptif Budaya Lokal

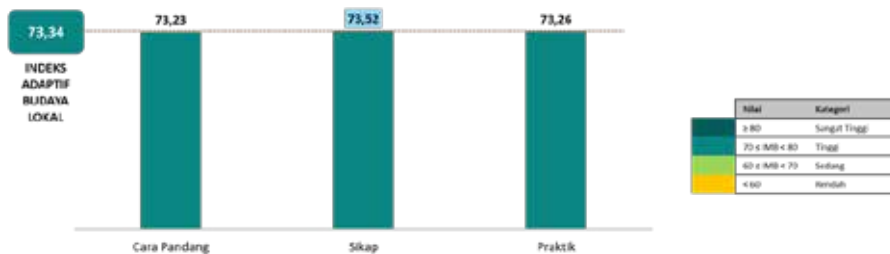
Pada Dimensi Adaptif Budaya Lokal, hasil pengukuran menunjukkan capaian yang relatif berimbang antar subdimensi. Subdimensi Sikap mencatat nilai tertinggi sebesar 73,52 diikuti oleh Subdimensi Praktik dengan skor 73,26, dan Subsimensi Cara Pandang sebesar 73,23. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara afektif, masyarakat cenderung lebih terbuka dalam menerima keberagaman ekspresi budaya lokal dibandingkan dengan tingkat pemahaman konseptual dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun selisih antar subdimensi relatif tipis, Dimensi Adaptif Budaya Lokal menjadi dimensi dengan nilai indeks terendah dibandingkan dimensi moderasi beragama lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian antara nilai-nilai keagamaan dan praktik budaya lokal belum sepenuhnya harmonis. Pada konteks tertentu, ekspresi budaya masih berpotensi dipersepsikan bertentangan dengan ajaran agama, sehingga memunculkan ruang ketegangan dan perdebatan di tingkat komunitas.

Capaian tersebut menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama pada Dimensi Adaptif Budaya Lokal perlu diarahkan pada upaya membangun pemaknaan keagamaan yang lebih kontekstual dan inklusif. Harmonisasi antara identitas keagamaan dan identitas budaya

menjadi prasyarat penting untuk mencegah gesekan sosial, sekaligus memperkuat kohesi dan ketahanan sosial masyarakat.

“73,34 skor Indeks Adaptif Budaya Lokal menunjukkan adaptasi budaya yang cukup baik, namun masih membutuhkan penguatan agar selaras dengan pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat.”



Gambar 3.11 IMB Masyarakat Umum Dimensi Adaptif Budaya Lokal

Dari lima atribut pada Dimensi Adaptif Budaya Lokal yang mencakup aspek cara pandang, sikap, dan praktik dengan capaian nilai terendah, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah tantangan struktural dan kultural dalam mengintegrasikan budaya lokal dengan praktik keagamaan antara lain:

- **Masyarakat masih menunjukkan kehati-hatian dalam mengintegrasikan budaya lokal ke dalam praktik keagamaan**

Sikap ini mencerminkan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa ekspresi budaya lokal berpotensi bertentangan dengan norma dan ajaran agama yang diyakini. Akibatnya integrasi agama dan budaya sering dilakukan secara selektif dan terbatas, sehingga nilai-nilai kearifan lokal belum sepenuhnya diakomodasi dalam praktik keberagaman sehari-hari.

- **Sebagian masyarakat masih memaknai tradisi adat sebagai praktik yang mengandung potensi penyimpangan teologis**

Meskipun banyak tradisi lokal yang pada dasarnya mengandung pesan moral dan spiritual yang bersifat universal seperti rasa syukur atas anugerah alam, keseimbangan ekologi, dan spiritualitas, namun masih ada masyarakat yang memaknainya sebagai praktik yang mengandung potensi penyimpangan teologis. Keterbatasan pemahaman terhadap substansi budaya lokal tersebut berpotensi menghambat upaya pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan beragama.

- **Sikap netral atau pasif terhadap budaya lokal masih cukup dominan di tengah masyarakat**



Gambar 3.12 Lima Atribut Dimensi Adaptif Budaya Lokal dengan Nilai Terendah

Masyarakat pada umumnya tidak menunjukkan penolakan terbuka terhadap budaya lokal, namun juga belum terlibat aktif dalam upaya pelestarian dan regenerasinya. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan budaya lokal, terutama dalam konteks perubahan sosial dan pengaruh globalisasi yang semakin kuat.

- **Masih terdapat kelompok yang menilai ritual dan perayaan budaya lokal tidak sejalan dengan ajaran agama**

Adanya kecenderungan dominasi tafsir keagamaan tertentu terhadap ekspresi budaya lokal, di mana budaya diposisikan sebagai entitas yang harus tunduk sepenuhnya pada interpretasi agama yang rigid. Situasi tersebut berpotensi mempersempit ruang ekspresi budaya dan melemahnya pluralitas kultural dalam masyarakat.

- **Budaya lokal belum dipandang sebagai media strategis dalam penyebaran dan internalisasi nilai-nilai agama**

Budaya lokal hingga kini belum dimaknai secara optimal sebagai media strategis dalam penyebaran dan internalisasi nilai-nilai agama, sehingga perannya masih terbatas pada ranah tradisi sosial semata. Dengan karakter yang kontekstual, membumi, dan dekat kehidupan masyarakat, budaya lokal memiliki potensi besar untuk menjadi sarana efektif penguatan nilai keagamaan dan moderasi beragama yang inklusif.

- **Masih adanya jarak antara agama dan simbol-simbol budaya lokal menandakan lemahnya internalisasi nilai adaptif**

Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi antara identitas keagamaan dan budaya masih belum terinternalisasi secara kuat dalam kesadaran bersama masyarakat. Diperlukan pengarusutamaan narasi keagamaan yang lebih terbuka dan kontekstual agar budaya lokal dapat diposisikan sebagai elemen penting dalam praktik keberagamaan yang moderat.

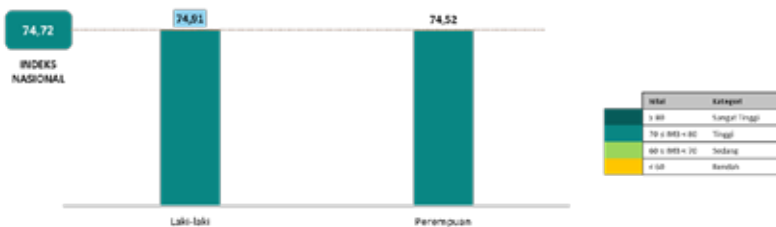
3.4. Potret IMB Menurut Demografi Masyarakat Umum

Hasil survei indeks moderasi beragama tahun 2025 dikelompokkan berdasarkan jenis, kelamin, kelompok generasi, dan tingkat Pendidikan

responden. Hasil ini diperinci untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait variasi skor moderasi beragama pada lapisan-lapisan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor demografis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penguatan maupun tantangan dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat. Hasil analisis demografis tersebut, dapat menjadi landasan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan masing-masing karakteristik kelompok masyarakat.

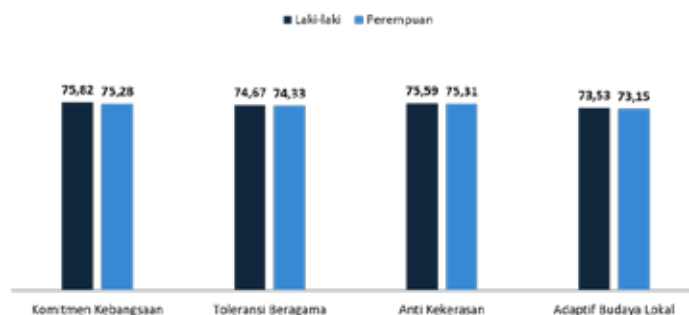
3.4.1. IMB Menurut Jenis Kelamin

Hasil indeks moderasi beragama tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan capaian yang relatif setara antara responden laki-laki dan perempuan. Skor indeks moderasi beragama pada responden laki-laki sebesar 74,91, sementara responden perempuan memperoleh nilai sebesar 74,52. Kedua skor tersebut masuk dalam kategori “tinggi”, yang artinya tingkat moderasi beragama pada kelompok gender tersebut berada pada level yang sama-sama kuat.



Gambar 3.13 Hasil Skor IMB 2025 Menurut Jenis Kelamin

Lebih lanjut, hasil pengujian statistik uji-t menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik baik pada nilai indeks moderasi beragama kelompok laki-laki maupun perempuan. Hasil ini menegaskan bahwa skor numerik yang ada tidak dapat merepresentasikan adanya perbedaan substantif tingkat moderasi beragama pada kelompok gender.



Gambar 3.14 Hasil Skor IMB tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Dimensi

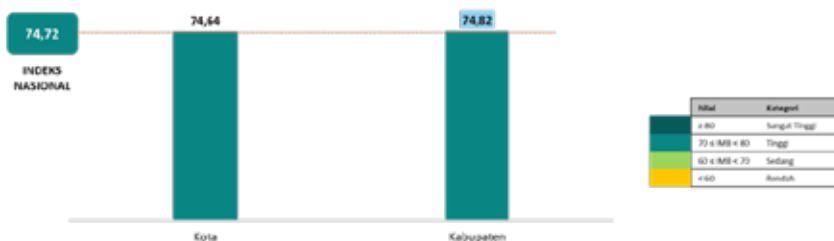
Berdasarkan dimensi indeks moderasi beragama, baik kelompok laki-laki maupun perempuan menunjukkan capaian skor tertinggi pada dimensi komitmen kebangsaan. Hasil tersebut mencerminkan bahwa kesadaran dan keterikatan kedua kelompok gender pada nilai-nilai kebangsaan dan konsensus nasional sama-sama kuat. Sedangkan skor terendah sama-sama tercatat pada dimensi adaptif terhadap budaya lokal. Meskipun skor yang tercatat berada pada kategori tinggi, temuan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan pada adaptasi praktik keagamaan terhadap konteks budaya lokal, sehingga memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan yang berbasis kultural.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dan variasi skor antar dimensi pada masing-masing kelompok gender, hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa jenis kelamin bukan merupakan faktor pembeda utama pada tingkat nilai moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama akan lebih efektif jika difokuskan pada aspek dimensi dibandingkan perbedaan jenis kelamin.

“Skor Indeks Moderasi Beragama berdasarkan jenis kelamin relative setara, identifikasi tantangan lebih didasarkan pada setiap dimensi, bukan faktor gender”

3.4.2. IMB Menurut Wilayah

Skor indeks moderasi beragama tahun 2025 berdasarkan perbedaan wilayah kabupaten dan kota relatif sama. Skor indeks moderasi beragama untuk wilayah kabupaten tercatat sebesar 74,82, sedangkan untuk wilayah kota mencatatkan nilai 74,64. Kedua capaian skor tersebut berada pada kategori tinggi, yang mencerminkan bahwa tingkat moderasi beragama masyarakat pada wilayah perkotaan maupun kabupaten relatif kuat.



Gambar 3.15 Hasil Skor IMB Masyarakat Umum Menurut Wilayah



Hasil statistik uji-t menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai indeks moderasi beragama masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun kabupaten. Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perbedaan nilai hasil tidak berimplikasi pada perbedaan substantif tingkat moderasi beragama pada masyarakat berdasarkan wilayah tempat tinggal.

Berdasarkan dimensinya, hasil survei indeks moderasi beragama pada kedua wilayah ini mencatatkan capaian tertinggi terdapat pada dimensi komitmen kebangsaan. Hasil ini menunjukkan kuatnya kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan baik pada wilayah perkotaan maupun wilayah kabupaten. Sementara dimensi dengan nilai terendah pada kedua kelompok wilayah yaitu dimensi adaptif terhadap budaya lokal.

Meskipun terdapat variasi hasil skor pada masing-masing dimensi antara masyarakat perkotaan dan kabupaten, hasil uji statistik tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah tempat tinggal bukan menjadi faktor pembeda pada tingkat moderasi beragama di masyarakat. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan dan kekuatan moderasi beragama relatif serupa baik di wilayah perkotaan maupun kabupaten, sehingga strategi penguatan moderasi beragama dapat dirancang lintas wilayah dengan penekanan pada dimensi ataupun sub dimensi yang masih memerlukan penguatan.

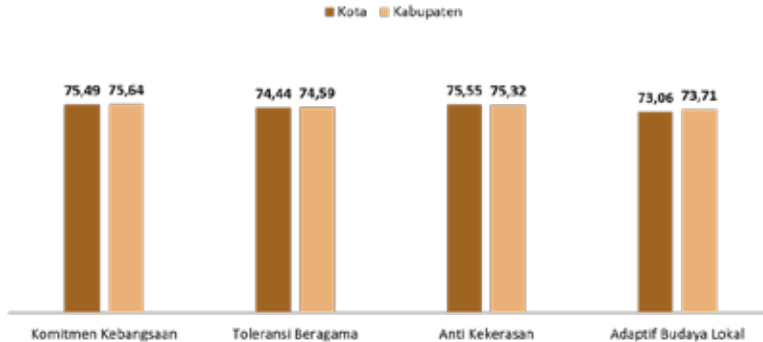
“Capaian IMB menegaskan bahwa wilayah tempat tinggal bukan faktor pembeda utama dalam tingkat moderasi beragama di masyarakat.”

3.4.3. IMB Menurut Tingkat Pendidikan

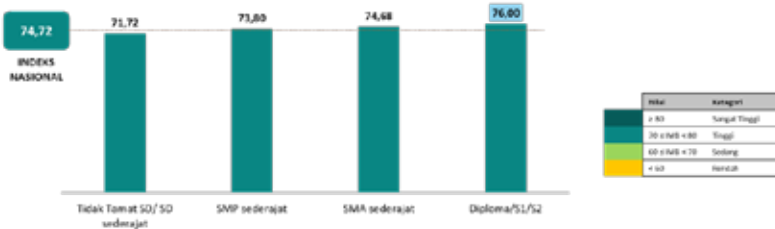
Hasil survei indeks moderasi beragama tahun 2025 berdasarkan kelompok jenjang pendidikan terakhir masyarakat menunjukkan adanya perbedaan capaian yang jelas antar kelompok. Kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan Diploma/Sarjana/Pascasarjana mencatatkan skor indeks moderasi beragama tertinggi yaitu sebesar 76,00, diikuti oleh kelompok lulusan SMA sederajat sebesar 74,68, jenjang SMP sederajat sebesar 73,80, dan kelompok jenjang Tidak Tamat SD/Tamat SD sederajat sebagai kelompok dengan skor indeks terendah yaitu 71,72. Berdasarkan hasil indeks tersebut, seluruh kelompok jenjang pendidikan berada pada kategori “tinggi”, namun menunjukkan tingkat capaian nilai yang konsisten naik seiring meningkatnya jenjang pendidikan.

Hasil pengujian statistik menggunakan metode ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil skor yang signifikan menurut jenjang pendidikan. Hasil ini menunjukkan bahwa latar belakang jenjang pendidikan memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat

moderasi beragama masyarakat, dimana masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat moderasi beragama yang lebih kuat.



Gambar 3.16 Hasil Skor IMB 2025 Menurut Wilayah dan Dimensi



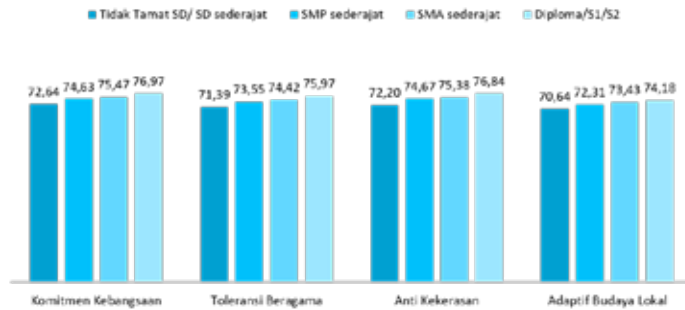
Gambar 3.17. Hasil Skor IMB 2025 Menurut Jenjang Pendidikan

Berdasarkan dimensi penyusunnya, masyarakat dengan latar belakang Diploma/S1/S2 mencatatkan nilai hasil tertinggi pada seluruh dimensi, kemudian diikuti oleh lulusan SMA sederajat, SMP sederajat, dan Tidak Tamat SD/Tamat SD sederajat sebagai kelompok dengan capaian skor terendah pada setiap dimensi. Pola penurunan nilai ini konsisten pada seluruh dimensi pengukuran moderasi beragama, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi latar belakang jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula nilai moderasi beragama pada setiap dimensi.

Secara lebih rinci, dimensi adaptif terhadap budaya lokal menjadi dimensi dengan hasil nilai terendah pada seluruh latar belakang jenjang pendidikan masyarakat, baik pada lulusan Diploma/S1/S2, SMA sederajat, SMP sederajat, maupun lulusan SD sederajat /Tidak Tamat SD. Sementara itu, pada masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan dimensi dengan nilai tertinggi yang bervariasi. Pada jenjang pendidikan Tidak tamat SD/Tamat SD sederajat, SMA/ sederajat, dan lulusan Diploma S1/S2 mencatatkan skor tertinggi



pada dimensi komitmen kebangsaan. Sedangkan disisi lain pada jenjang SMP sederajat, skor dimensi tertinggi tercatat pada dimensi anti kekerasan.



Gambar 3.18. Hasil Skor IMB 2025 Menurut Jenjang Pendidikan dan Dimensi

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan formal berperan penting dalam memperkuat dimensi-dimensi kunci moderasi beragama. Namun demikian, dimensi adaptasi terhadap budaya lokal masih menjadi tantangan masyarakat dengan seluruh latar belakang jenjang pendidikan serta membutuhkan pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan konteks dan keragaman budaya lokal masyarakat.

“Peningkatan jenjang pendidikan masyarakat berbanding lurus dengan kenaikan nilai Indeks Moderasi Beragama pada seluruh dimensi”

INDONESIA 2025
MODERASI BERAGAMA

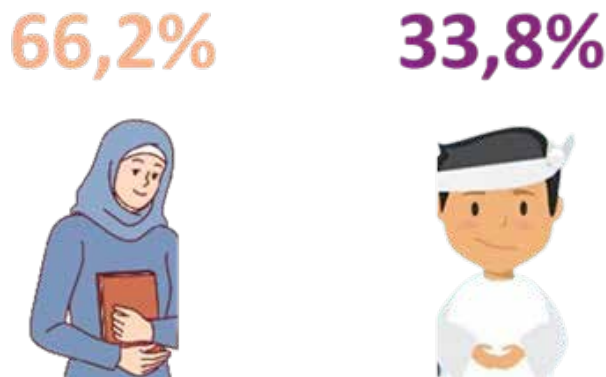
BAB IV

**POTRET INDEKS MODERASI
BERAGAMA (IMB)
MASYARAKAT PENDIDIK**

4.1. Profil Demografi Responden Masyarakat Pendidik

Komposisi responden dalam penelitian ini menunjukkan gambaran yang menarik tentang wajah masyarakat pendidik di Indonesia. Sebagian besar responden merupakan perempuan, yaitu sebesar 66,2%, sementara laki-laki berjumlah 33,8%. Dengan kata lain, dari setiap tiga orang pendidik yang terlibat dalam survei ini, dua di antaranya adalah perempuan. Potret ini tidak hanya mencerminkan realitas statistik, tetapi juga merepresentasikan fenomena sosial yang lebih luas, yakni semakin kuatnya peran perempuan dalam dunia pendidikan sebagai aktor utama pembentukan generasi.

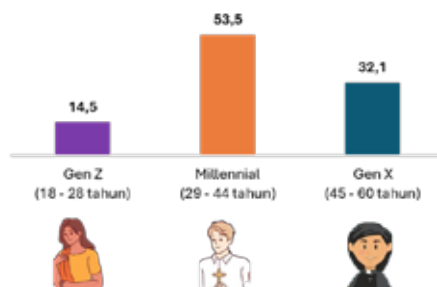
Masyarakat pendidik yang menjadi responden didominasi oleh perempuan, generasi milenial, berpendidikan tinggi, dan berprofesi sebagai guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Komposisi ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama di Indonesia bertumpu pada kelompok usia produktif dengan peran strategis dalam pembentukan nilai generasi muda.



Gambar 4.1 Responden Menurut Jenis Kelamin

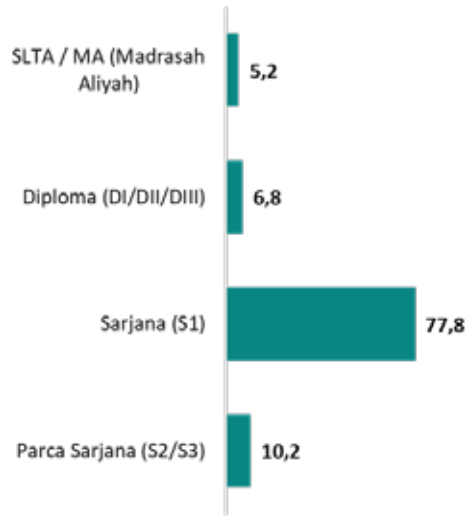
Ditinjau dari aspek generasi, mayoritas responden berasal dari generasi milenial, yaitu sebesar 53,5%, disusul generasi X sebesar 32,1%, dan generasi Z sebesar 14,5%. Generasi milenial pada tahun 2025 berada pada rentang usia 29–44 tahun, sedangkan generasi X berada pada usia 45–60 tahun, dan generasi Z pada rentang 18–28 tahun. Komposisi ini menggambarkan bahwa dunia pendidikan saat ini didominasi oleh kelompok usia produktif yang relatif matang secara profesional, sementara generasi Z

masih relatif sedikit karena sebagian besar masih berada pada tahap awal karier setelah menyelesaikan pendidikan formal.



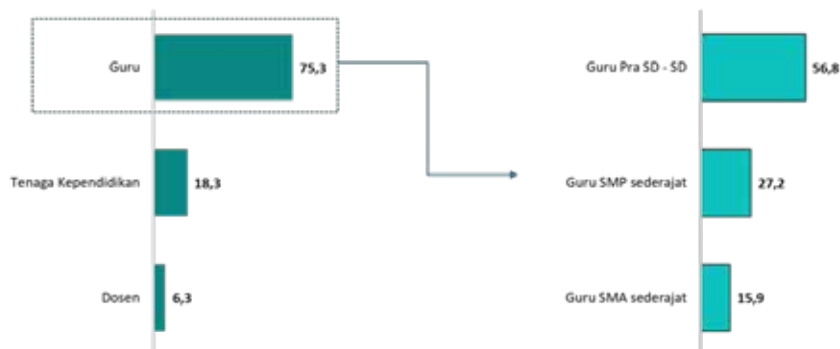
Gambar 4.2 Responden Menurut Generasi

Dari sisi latar belakang pendidikan, mayoritas masyarakat pendidik merupakan lulusan perguruan tinggi. Sebanyak 77,8% responden berpendidikan Sarjana (S1) dan 10,2% berpendidikan Pascasarjana. Sementara itu, responden lulusan Diploma mencapai 6,8% dan lulusan SMA/ sederajat sebesar 5,8%. Komposisi ini memperkuat gambaran bahwa profesi pendidik pada dasarnya merupakan profesi intelektual yang menuntut basis akademik yang kuat.



Gambar 4.3 Responden Menurut Pendidikan

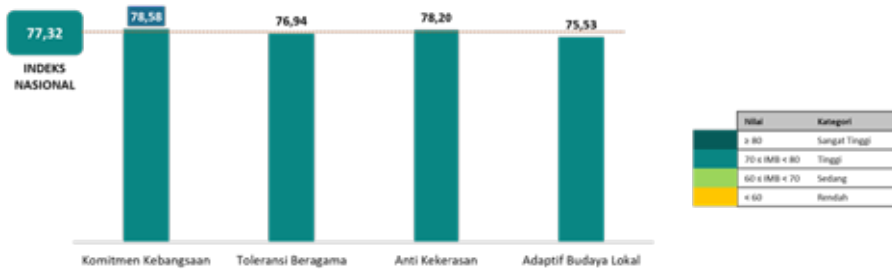
Jika dilihat berdasarkan kategori profesi, mayoritas responden adalah guru, yang mencakup 75,3% dari total responden. Dari kelompok guru tersebut, sebagian besar merupakan guru SD/MI (56,8%), disusul guru SMP/MTs (27,2%), dan guru SMA/MA (15,9%). Selebihnya adalah tenaga kependidikan dan dosen. Distribusi ini menunjukkan bahwa fondasi utama sistem pendidikan nasional memang berada pada pendidikan dasar dan menengah, tempat nilai-nilai moderasi beragama sangat strategis untuk ditanamkan sejak dini.



Gambar 4.4 Responden Menurut Kategori



Dari sisi kelembagaan, sebagian besar responden berasal dari lembaga pendidikan negeri (57,7%), sementara sisanya berasal dari lembaga pendidikan swasta (42,3%). Lembaga pendidikan yang dimaksud mencakup seluruh jenjang, mulai dari pra-sekolah hingga perguruan tinggi, baik di bawah naungan Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Komposisi ini menunjukkan bahwa potret masyarakat pendidik yang tergambar dalam penelitian ini cukup representatif terhadap struktur pendidikan nasional.



Gambar 4.5 Responden Menurut Status Lembaga

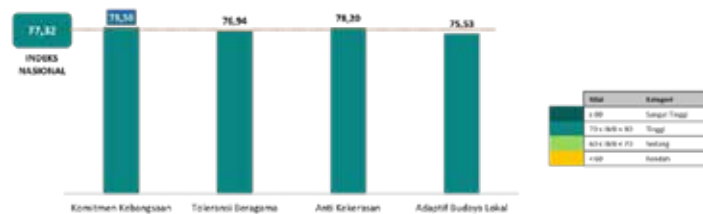
4.2. Potret IMB Nasional Masyarakat Pendidik



Secara nasional, Indeks Moderasi Beragama masyarakat pendidik berada pada kategori tinggi, mencerminkan pemahaman, sikap, dan praktik moderasi beragama yang relatif kuat. Meskipun seluruh dimensi menunjukkan capaian baik, adaptasi terhadap budaya lokal masih menjadi area yang memerlukan penguatan berkelanjutan.



Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Moderasi Beragama (IMB) tahun 2025, secara nasional masyarakat pendidik mencatatkan skor sebesar 77,32 dari skala 100 dan berada pada kategori “Tinggi”. Skor ini merefleksikan bahwa para pendidik di Indonesia secara umum telah memiliki pemahaman, sikap, serta praktik moderasi beragama yang relatif kuat dan konsisten. Capaian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar moderasi beragama telah tertanam dengan cukup baik di lingkungan pendidik dan menjadi modal penting dalam membentuk iklim pendidikan yang inklusif, damai, dan berimbang.



Gambar 4.5 IMB Nasional Masyarakat Pendidik

Ditinjau berdasarkan dimensi pengukuran, seluruh dimensi IMB pada masyarakat pendidik juga mencatatkan skor dalam kategori tinggi, meskipun terdapat variasi capaian yang mengindikasikan adanya ruang penguatan pada aspek tertentu. Dimensi Komitmen Kebangsaan menempati posisi tertinggi dengan skor 78,58. Skor ini menunjukkan kuatnya keterikatan pendidik terhadap nilai-nilai kebangsaan,



ideologi negara, serta komitmen menjaga persatuan dalam konteks kehidupan beragama. Kondisi ini dapat dipandang sebagai modal strategis dalam memperkuat peran pendidik sebagai agen pemersatu dan penanam nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan.

Selanjutnya, dimensi Anti Kekerasan memperoleh skor 78,20 yang mengindikasikan bahwa mayoritas pendidik memiliki komitmen yang kuat untuk menolak kekerasan dalam bentuk apa pun serta cenderung mengedepankan pendekatan dialogis dan damai dalam menyikapi perbedaan. Pada dimensi Toleransi Beragama, skor yang diperoleh sebesar 76,94, yang merepresentasikan adanya sikap keterbukaan dan penerimaan yang cukup baik terhadap keberagaman keyakinan, pandangan, dan praktik keagamaan di lingkungan pendidikan.

Adapun dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal mencatatkan skor 75,53 dan menjadi dimensi dengan capaian terendah dibandingkan dimensi lainnya. Meskipun demikian, skor tersebut tetap berada dalam kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik telah memiliki tingkat penerimaan yang cukup baik terhadap ekspresi budaya lokal dalam praktik keberagamaan. Namun, capaian ini juga mengindikasikan masih adanya ruang penguatan, khususnya dalam membangun sikap keberagamaan yang lebih lentur dan apresiatif terhadap keragaman budaya lokal.

Perbedaan capaian antar dimensi tersebut memberikan gambaran bahwa praktik moderasi beragama di kalangan pendidik secara umum sudah berada pada kondisi yang baik, namun tetap menyisakan ruang strategis untuk penguatan berkelanjutan, terutama pada aspek adaptasi terhadap keragaman budaya lokal dalam konteks pendidikan.

4.3. Potret Empat Pilar IMB Masyarakat Pendidik

Bagian ini menguraikan lebih jauh bagaimana empat pilar moderasi beragama, Komitmen Kebangsaan, Toleransi Beragama, Anti Kekerasan, dan Adaptif Budaya Lokal, tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat pendidik. Keempat pilar ini tidak hanya dibaca sebagai angka statistik, melainkan sebagai cermin sosial yang memperlihatkan dinamika kesadaran keberagamaan para pendidik.



Empat pilar moderasi beragama—
komitmen kebangsaan, toleransi
beragama, anti kekerasan, dan adaptif
budaya lokal—telah terinternalisasi
secara cukup baik di kalangan pendidik.
Namun, terdapat variasi antar pilar yang
mengindikasikan kebutuhan strategi
penguatan yang lebih terarah dan
kontekstual

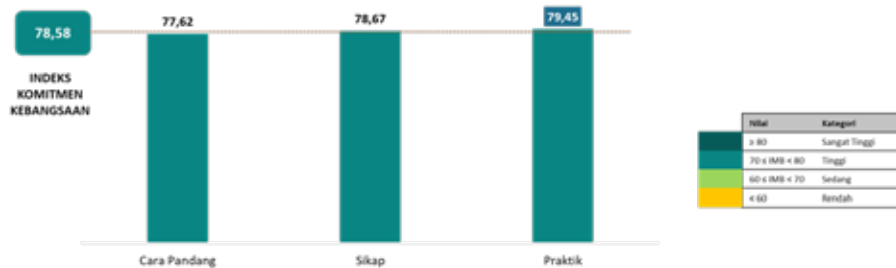


4.3.1 Komitmen Kebangsaan

Pada Dimensi Komitmen Kebangsaan, subdimensi Praktik mencatatkan capaian tertinggi dengan skor 79,45. Capaian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebangsaan telah terimplementasi secara kuat dalam perilaku masyarakat pendidik, baik dalam konteks profesional sebagai pendidik maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Subdimensi Sikap berada pada posisi berikutnya dengan skor 78,67, yang mencerminkan kecenderungan afektif pendidik untuk menerima, menghargai, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian penting dari identitas dan tanggung jawab sosial.

Adapun subdimensi Cara Pandang memperoleh skor 77,62 dan menjadi capaian terendah dibandingkan subdimensi lainnya, meskipun tetap berada dalam kategori tinggi. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara kognitif, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan pada sebagian pendidik masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar selaras dan semakin kokoh dengan praktik serta sikap yang telah terbentuk.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa komitmen kebangsaan masyarakat pendidik telah mengakar dengan baik, terutama pada tataran praksis. Praktik kebangsaan para pendidik menunjukkan tingkat perkembangan yang lebih menonjol dibandingkan dengan konstruksi cara pandang dan sikap, sehingga nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami, tetapi juga hidup dan berfungsi nyata dalam dinamika kehidupan pendidikan dan sosial.



Gambar 4.6 IMB Masyarakat Pendidik Dimensi Komitmen Kebangsaan



Gambar 4.7 Lima Atribut Dimensi Komitmen Kebangsaan Dengan Nilai Terendah

Dari lima atribut pada Dimensi Komitmen Kebangsaan yang mencakup aspek cara pandang, sikap, dan praktik, dapat diidentifikasi sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian kebijakan lebih lanjut, antara lain:



- **Penerimaan terhadap pemimpin publik lintas agama**
Menunjukkan masih adanya resistensi berbasis identitas keagamaan dalam memandang legitimasi kepemimpinan, di mana sebagian masyarakat masih mengaitkan kelayakan pemimpin dengan kesamaan agama. Pandangan ini berpotensi menggeser prinsip meritokrasi karena kompetensi, integritas, dan rekam jejak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan kepemimpinan. Jika kondisi ini dibiarkan, kualitas demokrasi dapat melemah karena preferensi politik lebih didorong oleh identitas daripada rasionalitas.
- **Penerimaan terhadap pemimpin Perempuan**
Menggambarkan kuatnya pengaruh budaya patriarki yang masih membatasi ruang kesetaraan gender dalam ranah publik, khususnya dalam konteks kepemimpinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya dipandang setara sebagai subjek politik, meskipun memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Dampaknya, peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan publik menjadi lebih terbatas secara sosial dan kultural.
- **Preferensi terhadap kesesuaian agama dalam kepemimpinan**
Menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memprioritaskan kesamaan identitas dibandingkan kompetensi dalam menentukan preferensi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa rasionalitas politik belum sepenuhnya berkembang dan masih dipengaruhi oleh pertimbangan emosional serta afiliasi kelompok. Akibatnya, proses pengambilan keputusan politik menjadi kurang objektif dan rentan terhadap polarisasi.
- **Sikap selektif terhadap keberagaman pilihan politik**
Mengindikasikan adanya kecenderungan eksklusivisme dalam kehidupan berbangsa, di mana perbedaan pilihan politik belum sepenuhnya diterima sebagai sesuatu yang wajar. Sikap ini berpotensi melemahkan kohesi sosial jika tidak diimbangi dengan kesadaran pluralisme politik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperbesar jarak sosial antar kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.
- **Praktik penolakan hoaks yang belum konsisten**
Menandakan bahwa kesadaran literasi digital sudah mulai tumbuh, tetapi belum sepenuhnya menjadi kebiasaan kolektif yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membuka ruang bagi hoaks dan disinformasi untuk tetap mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, pembiasaan verifikasi informasi menjadi kebutuhan mendesak dalam penguatan budaya literasi digital.

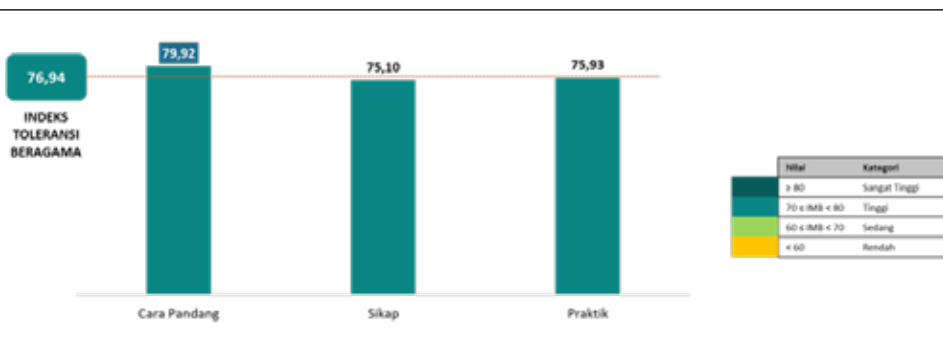
4.3.2 Toleransi Beragama

Pada Dimensi Toleransi Beragama, hasil pengukuran menunjukkan adanya dinamika yang cukup jelas antara ranah cara pandang, sikap, dan praktik di kalangan masyarakat pendidik. Subdimensi Cara Pandang mencatatkan skor tertinggi sebesar 79,92, yang menunjukkan bahwa secara konseptual para pendidik telah memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya toleransi sebagai prinsip fundamental

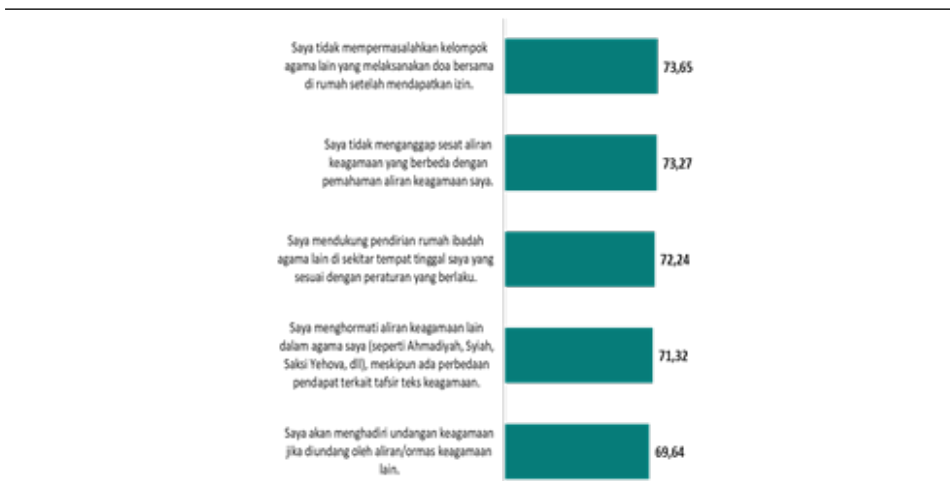
dalam kehidupan beragama dan sosial. Capaian ini merefleksikan bahwa toleransi telah diterima sebagai nilai normatif yang ideal dalam kerangka berpikir masyarakat pendidik.

Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi secara seimbang dalam ranah afektif dan praksis. Subdimensi Praktik memperoleh skor 75,93, sementara Subdimensi Sikap berada pada skor 75,10. Perbedaan capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun toleransi telah dipahami dengan baik pada tataran gagasan, tingkat internalisasi pada aspek sikap serta keberanian untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata masih relatif lebih rendah.

Kondisi ini mengisyaratkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan implementasi toleransi dalam kehidupan pendidikan dan sosial. Toleransi cenderung telah diterima sebagai nilai ideal, namun belum sepenuhnya terinternalisasi secara mendalam dalam sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat pendidik.



Gambar 4.8 IMB Masyarakat Pendidik Dimensi Toleransi Beragama



Gambar 4.9 Lima Atribut Dimensi Toleransi Beragama Dengan Nilai Terendah



Dari lima atribut pada Dimensi Toleransi Beragama yang mencakup aspek cara pandang, sikap, dan praktik, dapat diidentifikasi sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian kebijakan lebih lanjut, antara lain:

- Ketersediaan menghadiri undangan kegiatan keagamaan kelompok lain

Menunjukkan masih adanya resistensi berbasis identitas keagamaan dalam memandang legitimasi kepemimpinan, di mana sebagian masyarakat masih mengaitkan kelayakan pemimpin dengan kesamaan agama. Pandangan ini berpotensi menggeser prinsip meritokrasi karena kompetensi, integritas, dan rekam jejak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan kepemimpinan. Jika kondisi ini dibiarkan, kualitas demokrasi dapat melemah karena preferensi politik lebih didorong oleh identitas daripada rasionalitas.

- Penerimaan terhadap kelompok minoritas intra-agama (Ahmadiyah, Syiah, dan lainnya)

Menunjukkan adanya potensi eksklusivisme di dalam tubuh komunitas keagamaan sendiri, khususnya terhadap kelompok minoritas intra-agama. Sikap ini dapat memicu marginalisasi sosial dan menghambat terciptanya iklim keberagaman internal yang sehat. Dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi menumbuhkan konflik laten di dalam komunitas keagamaan itu sendiri.

- Pandangan terhadap perbedaan tafsir dalam agama

Mengindikasikan bahwa perbedaan pemahaman masih kerap dipersepsikan sebagai penyimpangan, bukan sebagai keniscayaan dalam tradisi keilmuan keagamaan. Pandangan semacam ini berpotensi mempersempit ruang dialog dan memperkuat sikap merasa paling benar. Akibatnya, tradisi keilmuan yang seharusnya terbuka terhadap perbedaan menjadi kurang berkembang secara kritis.

- Dukungan terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di sekitar tempat tinggal

Memperlihatkan adanya fenomena NIMBY (Not In My Backyard), yaitu menerima keberagaman secara prinsip, tetapi menolak ketika realitas tersebut hadir di ruang sosial terdekat. Sikap ini menunjukkan adanya jarak antara idealisme toleransi dan praktik toleransi dalam kehidupan nyata. Kesenjangan tersebut menjadi indikator bahwa internalisasi nilai toleransi belum sepenuhnya mengakar dalam perilaku sosial.

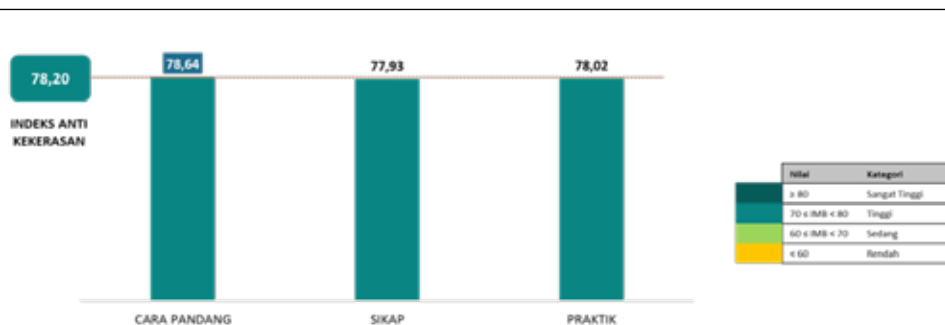
- Penerimaan terhadap aktivitas ibadah kelompok berbeda

Menunjukkan bahwa masih terdapat batas psikologis dalam interaksi lintas keyakinan yang membuat relasi antar kelompok belum sepenuhnya cair. Batas ini dapat menghambat terbangunnya kepercayaan sosial dan solidaritas lintas agama. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengurangi kualitas kohesi sosial dalam masyarakat plural.

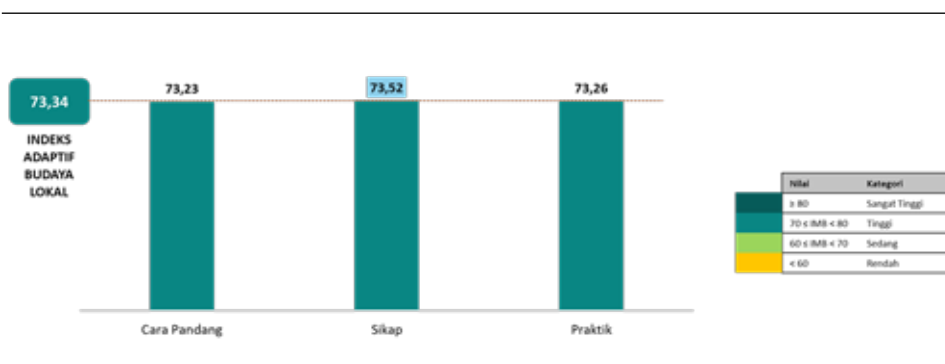
4.3.3 Anti Kekerasan

Pada Dimensi Anti Kekerasan, hasil pengukuran menunjukkan konsistensi capaian antara ranah cara pandang, sikap, dan praktik di kalangan masyarakat pendidik. Subdimensi Cara Pandang mencatatkan skor 78,64, disusul oleh Subdimensi Praktik sebesar 78,02, serta Subdimensi Sikap sebesar 77,93. Relatif meratanya capaian antar-subdimensi ini mengindikasikan bahwa sikap penolakan terhadap kekerasan tidak hanya kuat pada tataran konseptual, tetapi juga telah terinternalisasi secara cukup seimbang dalam aspek afektif dan terwujud dalam perilaku nyata.

Secara substantif, capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat pendidik memiliki kecenderungan yang kuat untuk menolak segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan yang dilegitimasi atas nama agama. Komitmen terhadap penyelesaian perbedaan melalui pendekatan damai dan dialogis tampak telah menjadi bagian dari pola pikir dan praktik keseharian, sehingga memperkuat peran pendidik sebagai agen perdamaian di lingkungan pendidikan maupun sosial.



Gambar 4.10 IMB Masyarakat Pendidik Dimensi Anti Kekerasan



Gambar 4.11 Lima Atribut Dimensi Anti Kekerasan Dengan Nilai Terendah



Dari lima atribut pada Dimensi Anti Kekerasan yang mencakup aspek cara pandang, sikap, dan praktik, dapat diidentifikasi sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian kebijakan lebih lanjut, antara lain:

- **Sikap ambigu terhadap tindakan kekerasan simbolik**

Menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya tegas dalam menolak ujaran kebencian, terutama ketika ujaran tersebut dibungkus dengan sentimen keagamaan. Sikap ragu-ragu ini dapat memperlemah upaya kolektif dalam membangun ruang publik yang sehat. Ketidaktegasan dalam merespons ujaran kebencian berpotensi menormalisasi praktik intoleransi di ruang sosial.

- **Toleransi terhadap tekanan sosial berbasis agama**

Mengindikasikan adanya ruang abu-abu dalam merespons intimidasi berbasis keyakinan, di mana masyarakat cenderung memilih diam daripada bersikap tegas. Sikap pasif ini berpotensi memberi ruang tumbuh bagi praktik intoleransi. Dalam situasi tertentu, pembiaran sosial semacam ini dapat mempercepat eskalasi konflik berbasis identitas.

- **Partisipasi dalam menentang tindakan intoleran**

Menggambarkan bahwa sikap aktif melawan intoleransi belum menjadi budaya kolektif dalam kehidupan sosial. Banyak individu mungkin menolak intoleransi secara pribadi, tetapi belum merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk menyuarakan penolakan tersebut secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran kolektif sebagai warga yang aktif dalam menjaga ruang sosial yang inklusif.

- **Persepsi terhadap pembenaran kekerasan dalam situasi tertentu**

Menunjukkan masih adanya potensi rasionalisasi kekerasan atas nama moral atau agama, khususnya ketika isu yang dihadapi dianggap sensitif. Kondisi ini berbahaya karena dapat menjadi justifikasi bagi tindakan diskriminatif maupun represif. Jika tidak dikritisi, rasionalisasi semacam ini dapat merusak prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

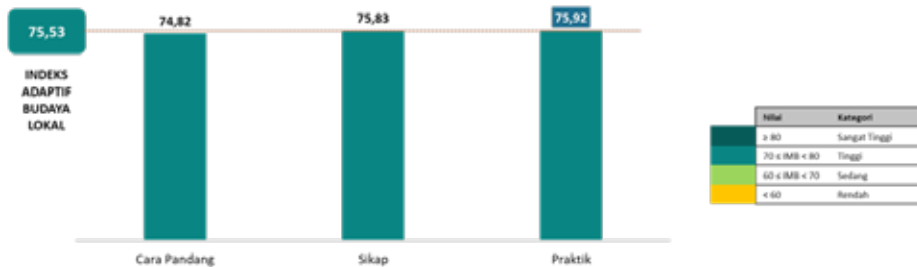
- **Pandangan tentang pentingnya forum dialog lintas agama**

Mengindikasikan bahwa dialog antariman belum sepenuhnya dianggap sebagai kebutuhan sosial yang penting dan mendesak. Dialog sering dipersepsikan sebatas kegiatan formal, belum dipahami sebagai sarana strategis membangun saling pengertian. Akibatnya, potensi dialog sebagai ruang pembelajaran sosial belum dimanfaatkan secara optimal.

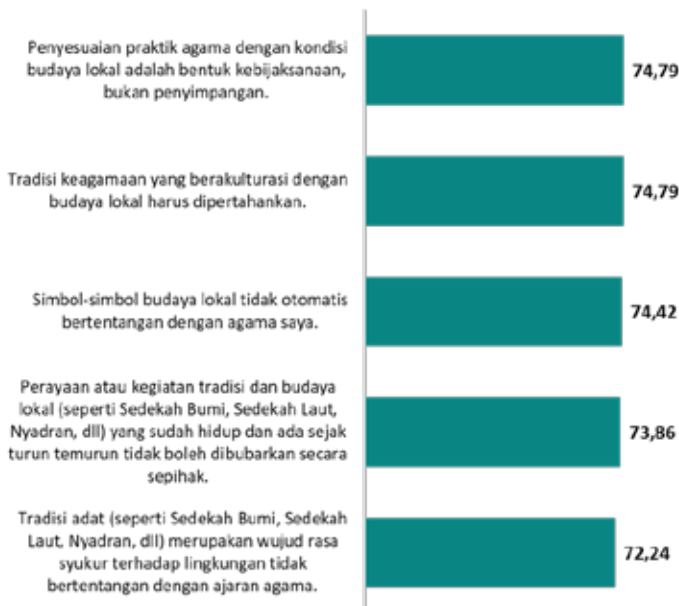
4.3.4 Adaptif Budaya Lokal

Pada Dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal, hasil pengukuran menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya, meskipun seluruh subdimensi tetap berada dalam kategori tinggi. Subdimensi Praktik mencatatkan skor tertinggi sebesar 75,92, disusul oleh Subdimensi Sikap sebesar 75,83, dan Subdimensi Cara Pandang sebesar 74,82. Pola capaian ini menunjukkan bahwa aspek praksis dan afektif relatif lebih kuat dibandingkan dengan aspek kognitif dalam memaknai relasi antara ekspresi keagamaan dan konteks budaya lokal.

Secara substantif, temuan ini mengindikasikan bahwa relasi antara ajaran agama dan ekspresi budaya lokal masih menjadi wilayah yang cukup sensitif dalam kesadaran masyarakat pendidik. Meskipun secara umum terdapat tingkat penerimaan yang cukup baik terhadap keberagaman budaya lokal, capaian pada subdimensi cara pandang yang lebih rendah mengisyaratkan adanya kecenderungan pemaknaan keagamaan yang belum sepenuhnya lentur. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan berkelanjutan dalam membangun perspektif keberagaman yang lebih terbuka, kontekstual, dan apresiatif terhadap kekayaan budaya lokal.



Gambar 4.12 IMB Masyarakat Pendidik Dimensi Adaptif Budaya Lokal



Gambar 4.13. Lima Atribut Dimensi Adaptif Budaya Lokal Dengan Nilai Terendah



Dari lima atribut pada Dimensi Adaptif Budaya Lokal yang mencakup aspek cara pandang, sikap, dan praktik, dapat diidentifikasi sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian kebijakan lebih lanjut, antara lain:

- **Penerimaan terhadap integrasi budaya lokal dalam praktik keagamaan**
Menunjukkan masih adanya kehati-hatian bahkan kecurigaan terhadap unsur budaya dalam praktik keagamaan. Sikap ini muncul karena sebagian masyarakat masih memandang budaya lokal sebagai sesuatu yang berpotensi bertentangan dengan ajaran agama. Akibatnya, proses integrasi antara nilai agama dan kearifan lokal berjalan lambat dan belum berkembang secara optimal.
- **Pandangan bahwa tradisi adat berpotensi menyimpang secara teologis**
Menggambarkan kuatnya pengaruh tafsir keagamaan yang kaku terhadap ekspresi budaya, sehingga tradisi lokal sering dinilai secara sempit. Banyak praktik adat yang sebenarnya sarat makna sosial dan spiritual justru dipersepsikan sebagai ancaman teologis. Persepsi ini dapat menghambat pelestarian tradisi yang sesungguhnya memiliki fungsi edukatif dan memperkuat solidaritas sosial.
- **Sikap pasif terhadap pelestarian budaya lokal**
Menunjukkan bahwa dukungan terhadap budaya belum terwujud dalam tindakan nyata yang konsisten. Masyarakat cenderung bersikap netral atau pasif, sehingga pelestarian budaya tidak mendapat energi sosial yang cukup kuat. Kondisi ini berpotensi mempercepat pudarnya identitas budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda.
- **Penolakan terhadap ritual tradisi tertentu**
Mengindikasikan adanya dominasi tafsir agama atas ekspresi budaya lokal, di mana budaya sering diposisikan sebagai subordinat. Penilaian semacam ini membuat sebagian tradisi tidak lagi dipraktikkan secara terbuka dalam masyarakat. Jika terus berlangsung, kondisi ini dapat menggerus kekayaan tradisi lokal yang sebenarnya memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi.
- **Pandangan bahwa budaya lokal kurang relevan sebagai media penyebaran nilai agama**
Menunjukkan belum optimalnya pemahaman tentang potensi budaya sebagai sarana edukatif dan media internalisasi nilai. Padahal, budaya lokal dapat menjadi instrumen efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara kontekstual dan membumi. Pemanfaatan budaya sebagai media edukasi juga berpotensi memperkuat penerimaan nilai agama secara lebih alami di tengah masyarakat.

4.4. Potret IMB Menurut Demografi Masyarakat Pendidik

Bagian ini menyajikan hasil pembacaan Indeks Moderasi Beragama (IMB) yang dikelompokkan berdasarkan sejumlah karakteristik demografis responden. Pengelompokan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi capaian moderasi beragama pada berbagai lapisan sosial. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi aspek-aspek demografis yang berpotensi memengaruhi penguatan maupun

tantangan dalam implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama yang lebih kontekstual dan tepat sasaran sesuai karakteristik kelompok responden.

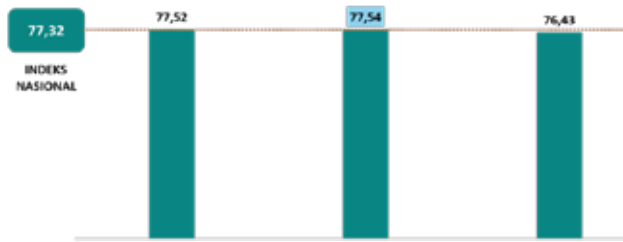


Capaian moderasi beragama bervariasi menurut karakteristik demografis, seperti profesi, jenis kelamin, dan status lembaga. Variasi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan peran struktural, sehingga memerlukan strategi penguatan yang tidak bersifat seragam.



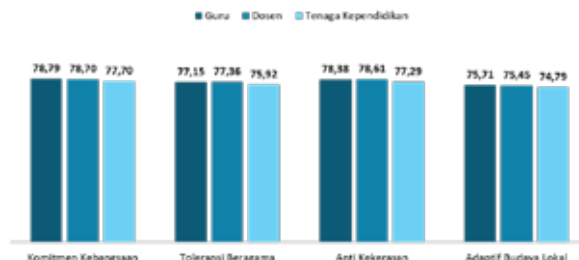
4.4.1 IMB Menurut Kategori

Hasil pembacaan Indeks Moderasi Beragama (IMB) tahun 2025 berdasarkan kategori profesi memberikan gambaran mengenai variasi capaian moderasi beragama pada kelompok peran sosial yang berbeda di lingkungan pendidikan. Kelompok dosen mencatatkan skor IMB sebesar 77,54, diikuti sangat dekat oleh guru dengan skor 77,52, sementara tenaga kependidikan memperoleh skor sebesar 76,43. Seluruh capaian tersebut berada dalam kategori “tinggi”, yang menunjukkan bahwa tingkat moderasi beragama pada ketiga kelompok profesi secara umum berada pada level yang kuat.



Gambar 4.14 IMB Masyarakat Pendidik Menurut Kategori

Lebih lanjut, hasil pengujian statistik menggunakan uji ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan skor antar kelompok profesi dinyatakan signifikan secara statistik. Namun demikian, secara substantif selisih capaian antar kelompok relatif tidak terlalu mencolok. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat variasi numerik antar profesi, perbedaan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kesenjangan yang tajam dalam kualitas moderasi beragama.



Gambar 4.15 IMB Masyarakat Pendidik Menurut Kategori dan Dimensi

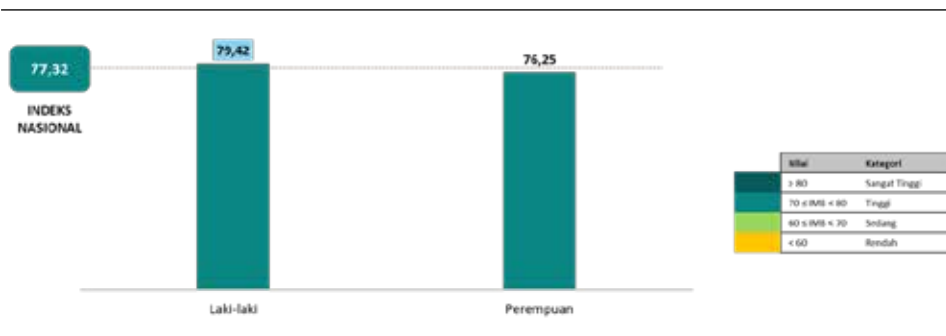
Secara sosiologis, capaian yang sedikit lebih tinggi pada kelompok dosen dan guru dapat dipahami sebagai konsekuensi dari peran mereka yang terlibat langsung dalam proses pedagogis. Dosen dan guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai figur rujukan nilai, sikap, dan cara pandang bagi peserta didik. Dengan demikian, tingkat kesadaran dan artikulasi moderasi beragama pada kelompok ini cenderung lebih terbangun dalam praktik keseharian.

Ditinjau berdasarkan dimensi indeks moderasi beragama, seluruh kategori profesi secara konsisten mencatatkan skor tertinggi pada dimensi Komitmen Kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan konsensus nasional telah mengakar kuat di seluruh aktor pendidikan. Sebaliknya, dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal kembali menjadi dimensi dengan skor terendah pada semua kelompok profesi. Meskipun capaian tersebut tetap berada dalam kategori tinggi, pola yang berulang ini mengindikasikan bahwa tantangan utama moderasi beragama di lingkungan pendidikan terletak pada kemampuan mengelola relasi antara ajaran agama dan konteks budaya lokal.

Dengan demikian, variasi skor antar profesi memberikan gambaran bahwa perbedaan peran sosial memiliki pengaruh tertentu terhadap artikulasi moderasi beragama, namun penguatan kebijakan akan lebih efektif jika difokuskan pada aspek dimensi khususnya penguatan adaptasi kultural daripada semata-mata pada perbedaan latar profesi.

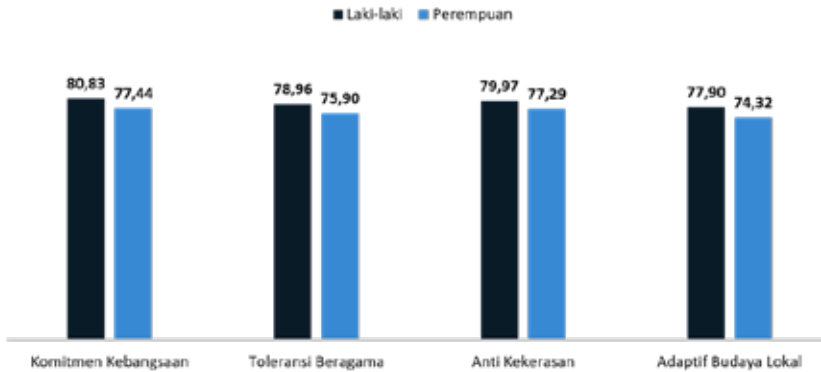
4.4.2 IMB Menurut Jenis Kelamin

Hasil analisis Indeks Moderasi Beragama (IMB) tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan adanya perbedaan capaian antara masyarakat pendidik laki-laki dan perempuan. Responden laki-laki mencatatkan skor IMB sebesar 79,42, sementara responden perempuan memperoleh skor sebesar 76,25. Kedua capaian tersebut sama-sama berada dalam kategori “tinggi”, namun terdapat selisih skor yang menunjukkan variasi tingkat moderasi beragama antar kelompok gender.



Gambar 4.16 IMB Masyarakat Pendidik Menurut Jenis Kelamin

Lebih lanjut, hasil pengujian statistik menggunakan uji-t menunjukkan bahwa perbedaan capaian tersebut signifikan secara statistik. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan skor numerik yang tercatat merepresentasikan adanya perbedaan yang bermakna secara substantif dalam pola moderasi beragama antara pendidik laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, jenis kelamin dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi variasi tingkat moderasi beragama di lingkungan pendidik.



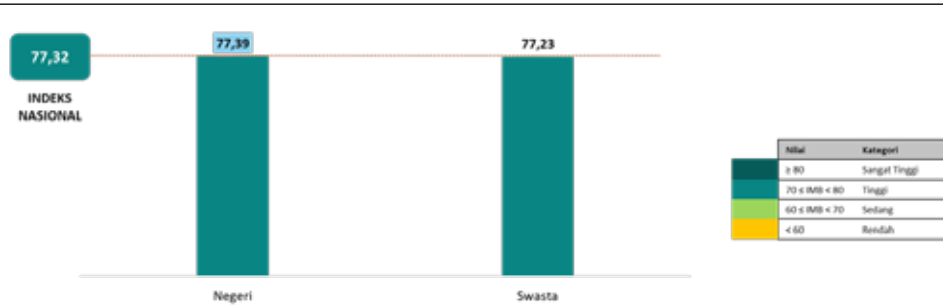
Gambar 4.17 IMB Masyarakat Pendidik Menurut Jenis Kelamin dan Dimensi

Ditinjau berdasarkan dimensi indeks moderasi beragama, kelompok laki-laki cenderung mencatatkan skor lebih tinggi pada hampir seluruh dimensi, terutama pada dimensi Komitmen Kebangsaan dan Anti Kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan terhadap nilai-nilai kebangsaan serta komitmen menolak kekerasan relatif lebih kuat pada kelompok pendidik laki-laki. Sementara itu, kelompok perempuan justru menunjukkan capaian yang relatif lebih menonjol pada dimensi Toleransi Beragama, yang merefleksikan adanya kecenderungan sikap keterbukaan dan penerimaan terhadap keberagaman yang lebih kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengalaman sosial, konstruksi peran gender, serta posisi individu dalam struktur sosial turut membentuk cara seseorang menghayati dan mempraktikkan keberagamaan. Dalam konteks dunia pendidikan, hasil ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa strategi penguatan moderasi beragama tidak dapat diseragamkan, melainkan perlu mempertimbangkan dinamika pengalaman sosial yang berbeda antara pendidik laki-laki dan perempuan agar intervensi kebijakan menjadi lebih kontekstual dan efektif.

4.4.3 IMB Menurut Status Lembaga

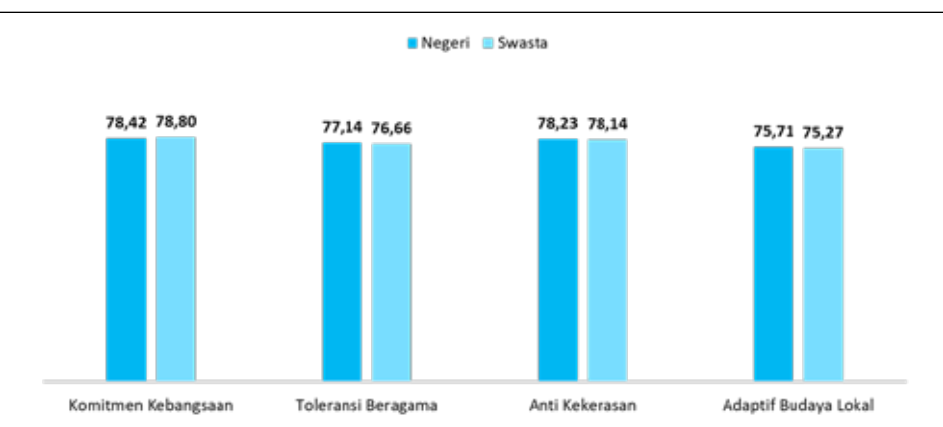
Hasil analisis Indeks Moderasi Beragama (IMB) tahun 2025 berdasarkan status lembaga menunjukkan bahwa capaian moderasi beragama masyarakat pendidik di lembaga pendidikan negeri sebesar 77,39, sementara di lembaga pendidikan swasta sebesar 77,23. Kedua capaian tersebut berada dalam kategori “tinggi” dengan selisih skor

yang sangat tipis. Lebih lanjut, hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik, yang berarti tidak terdapat perbedaan substantif tingkat moderasi beragama antara pendidik di lembaga negeri dan swasta. Temuan ini mengindikasikan bahwa moderasi beragama tumbuh relatif serupa dalam kedua konteks kelembagaan.



Gambar 4.18 IMB Masyarakat Pendidik Menurut Status Lembaga

Secara konseptual, hasil ini memberikan pesan penting bahwa penguatan moderasi beragama tidak semata-mata ditentukan oleh status kelembagaan formal, melainkan lebih dipengaruhi oleh ekosistem pendidikan secara keseluruhan, yang mencakup kebijakan institusional, iklim sosial, serta praktik keseharian para pendidik. Dengan demikian, upaya penguatan moderasi beragama perlu dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang melampaui batas-batas institusi.



Gambar 4.19 IMB Masyarakat Pendidik Menurut Status Lembaga dan Dimensi

Ditinjau berdasarkan dimensi indeks moderasi beragama, baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta menunjukkan pola capaian yang konsisten. Dimensi Komitmen Kebangsaan secara umum mencatatkan skor tertinggi, sedangkan dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal berada pada posisi terendah. Konsistensi pola ini menegaskan



bahwa agenda penguatan moderasi beragama merupakan pekerjaan bersama lintas institusi dan memerlukan pendekatan yang sistemik dan terintegrasi dalam keseluruhan lanskap pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, temuan dalam bab ini menunjukkan bahwa masyarakat pendidik memiliki tingkat moderasi beragama yang relatif kuat, baik pada level cara pandang, sikap, maupun praktik. Keempat pilar moderasi beragama Komitmen Kebangsaan, Toleransi Beragama, Anti Kekerasan, dan Adaptif terhadap Budaya Lokal telah terinternalisasi dalam kadar yang cukup baik di kalangan pendidik dan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan profesional maupun sosial. Capaian ini menunjukkan bahwa pendidik tidak hanya memahami moderasi beragama sebagai konsep normatif, tetapi juga telah mengartikulusikannya dalam sikap serta praktik keseharian di lingkungan pendidikan.

Meskipun demikian, hasil analisis juga memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang-ruang tertentu yang memerlukan penguatan secara lebih terarah. Beberapa dimensi dan subdimensi, khususnya yang berkaitan dengan adaptasi terhadap keragaman budaya lokal serta kesenjangan antara pemahaman konseptual dan implementasi praksis, mengindikasikan adanya tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Temuan ini menunjukkan bahwa proses internalisasi moderasi beragama bersifat dinamis dan memerlukan upaya berkelanjutan, baik melalui penguatan kapasitas individu pendidik maupun melalui pembenahan ekosistem pendidikan secara struktural dan kultural.

Lebih jauh, variasi temuan pada setiap dimensi dan karakteristik demografis memperlihatkan bahwa moderasi beragama bukanlah konstruk yang homogen, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman sosial, peran profesional, latar belakang institusional, serta konteks kultural yang melingkupi kehidupan para pendidik. Perbedaan capaian berdasarkan jenis kelamin, profesi, dan status lembaga menunjukkan bahwa moderasi beragama tumbuh dalam interaksi yang kompleks antara individu dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, strategi penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan perlu dirancang secara lebih kontekstual, sensitif terhadap keragaman pengalaman, dan berbasis pada kebutuhan nyata masing-masing kelompok pendidik.

Dengan demikian, penguatan moderasi beragama tidak dapat dipahami sebagai agenda yang bersifat seragam dan linier, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang membutuhkan pendekatan holistik dan berlapis. Upaya ini menuntut sinergi antara kebijakan pendidikan, pengembangan kapasitas pendidik, serta penciptaan iklim pendidikan yang inklusif, dialogis, dan menghargai keragaman. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat memastikan bahwa moderasi beragama tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar mengakar dan berfungsi sebagai fondasi etis dalam kehidupan pendidikan dan kebangsaan.

INDEKS
T H N 2 0 2 5
M O D E R A S I
A G A M A

BAB V

**PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA (IMB) BERBASIS
KEARIFAN LOKAL**



5.1. Budaya, Agama, dan Kontestasi Makna: Kerangka Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu agenda strategis Kementerian Agama yang diarahkan untuk menjaga kualitas kehidupan beragama di ruang publik. Dalam konteks tersebut, Survei IMB 2025 dirancang untuk memotret kondisi moderasi beragama secara nasional pada dua kategori responden utama, yaitu masyarakat umum dan masyarakat pendidik, melalui survei tatap muka di 34 provinsi. Moderasi beragama penting karena berfungsi sebagai landasan etika kewargaan yang meneguhkan penghormatan terhadap perbedaan, menekan eskalasi prasangka dan



Dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal menjadi titik terlemah dalam IMB

2025, baik pada masyarakat umum maupun pendidik, yang menandakan adanya gesekan makna antara identitas agama dan budaya. Penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal diposisikan sebagai respons strategis untuk menata ulang tafsir simbol, legitimasi praktik, dan habitus sosial agar adaptasi budaya tidak dipersepsikan sebagai penyimpangan.



polarisasi, serta memperkuat kohesi sosial melalui praktik hidup berdampingan yang berkeadilan. Dalam masyarakat multikultural seperti di Indonesia, moderasi beragama bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan prasyarat stabilitas sosial yang memungkinkan keragaman agama, etnis, bahasa, dan budaya dikelola sebagai sumber daya integratif, bukan sebagai pemicu fragmentasi.

Temuan Indeks Moderasi Beragama (IMB) 2025 menunjukkan bahwa dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal menjadi dimensi dengan capaian terendah pada kedua kategori responden. Pada masyarakat umum, subdimensi sikap (73,52) sedikit lebih tinggi dibanding praktik (73,26) dan cara pandang (73,23), namun tetap menjadi capaian terendah sehingga mengindikasikan adanya ruang gesekan antara identitas budaya dan identitas keagamaan. Pada masyarakat pendidik, pola serupa juga muncul, dimensi ini tetap terendah, dengan praktik (75,92) dan sikap (75,83) relatif lebih tinggi daripada cara pandang (74,82). Pola ini menandakan bahwa adaptasi dapat hadir sebagai kebiasaan atau kepatuhan sosial, tetapi fondasi kognitifnya belum cukup kokoh untuk bertahan ketika terjadi tekanan sosial, perdebatan teologis, atau kontestasi otoritas. Karena itu, penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal tidak diposisikan sebagai “pengayaan budaya”, melainkan sebagai respons langsung atas titik lemah yang terukur dalam IMB 2025.

Agar strategi tidak jatuh menjadi daftar kegiatan seremonial, bab ini menggunakan dua lensa teoretik yang saling melengkapi. Pertama, Clifford Geertz (1973)

yang memandang kebudayaan sebagai jejaring makna yang hidup melalui simbol, ritus, bahasa, dan praktik sehari-hari. Dalam kerangka ini, tradisi lokal seperti sedekah bumi, sedekah laut, atau nyadran bukan “artefak budaya”, melainkan bahasa simbolik yang menata relasi manusia dengan komunitas, lingkungan, dan yang sakral. Resistensi terhadap tradisi dapat dipahami sebagai problem tafsir simbol, ketika simbol budaya dibaca sebagai kompetitor teologi, kehati-hatian dan penolakan menjadi respons yang dapat



diprediksi. Konsekuensinya, penguatan harus menata ulang kerangka makna publik, dari “tradisi sebagai ancaman” menjadi “tradisi sebagai medium syukur ekologis, etika publik, dan kohesi sosial”.

Kedua, Pierre Bourdieu (2010) membantu menjelaskan mengapa problem ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan edukasi pengetahuan budaya. Gesekan agama-budaya sering merupakan kontestasi otoritas simbolik tentang mana praktik yang sah dan mana yang dianggap menyimpang. Habitus membentuk rasa kewajaran dan pola tindakan, sementara arena sosial mempertemukan aktor-aktor dengan modal berbeda (simbolik, budaya, sosial, religius) untuk mendefinisikan batas legitimasi. Rendahnya subdimensi cara pandang pada pendidik memperlihatkan bahwa praktik adaptif bisa hadir, namun legitimasi kognitif-etiknya rapuh ketika arena pendidikan berhadapan dengan tekanan sosial. Karena itu, strategi penguatan harus bekerja pada dua lapis sekaligus yaitu pergeseran tafsir simbol dan pembentukan habitus serta penguatan legitimasi praktik.

Berbagai literatur menunjukkan bahwa di ranah pendidikan, penguatan moderasi berbasis kearifan lokal terbukti efektif ketika dijalankan melalui mekanisme pembiasaan, pembudayaan, dan pemberdayaan yang terintegrasi dalam mata pelajaran, muatan lokal, dan ekstrakurikuler, sehingga “produk budaya” terproyeksi menjadi kompetensi sosial yang dipraktikkan di masyarakat (Fauzian et al., 2021). Temuan serupa muncul pada penelitian (Fahrudin et al., 2025) tentang pengembangan model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai moderasi dengan praktik budaya Islam lokal Lamongan melalui pembelajaran aktif-kolaboratif dan pengalaman langsung, serta dinilai meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku moderat siswa. Di ranah komunitas, tradisi lokal berfungsi sebagai infrastruktur sosial untuk membangun identitas kolektif, kohesi, dan kebersamaan lintas kelompok, sehingga relevan sebagai wahana aktualisasi indikator moderasi beragama (Tohari & Nafiuddin, 2024), termasuk melalui kegiatan penyuluhan yang melibatkan komunitas internal dan partisipasi lintas iman (Wirawan et al., 2022).

Studi etnografis juga menunjukkan bahwa harmoni Islam dan adat dapat tumbuh organik dalam komunitas tanpa dikotomisasi identitas (Asrawijaya, 2022), sementara studi tentang komunitas Ocu di Kampar, Riau menegaskan moderasi beragama dapat hidup sebagai praktik sosial yang terinternalisasi melalui modernisasi nilai budaya lokal (Pelupessy, 2025). Dalam konteks era digital dan generasi muda, teknologi pendidikan dapat memfasilitasi dokumentasi dan revitalisasi tradisi lintas agama (Suhirman et al., 2025), dan literasi keagamaan yang dipadukan dengan penalaran moderasi efektif mencegah radikalisasi dengan strategi dialog, pendidikan inklusif, pemanfaatan media sosial, serta penguatan tradisi lokal sebagai ruang pembelajaran sosial (Takdir, 2025).

Implikasinya, bab ini memusatkan analisis pada penguatan moderasi berbasis kearifan lokal sebagai intervensi yang menyasar sumber resistensi utama yaitu problem batas legitimasi antara akomodasi yang bijaksana dan klaim penyimpangan. Arah penguatan dan desain intervensi dituntun oleh indikator Adaptif Budaya Lokal agar tetap disiplin pada data IMB, namun diperdalam

secara analitis melalui kerangka Geertz dan Bourdieu agar dapat menjelaskan mekanisme sosial-budaya yang membuat dimensi ini menjadi yang terlemah.

5.2. Arah Strategi Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal

Arah strategi penguatan berbasis teori dan indikator IMB pada bagian ini sengaja dibatasi hanya pada hal-hal yang benar-benar bisa diturunkan langsung dari indikator IMB dan narasi temuan lapangan, agar strategi yang dirumuskan tidak melebar menjadi daftar rekomendasi umum yang sulit diukur. Pembatasan ini penting karena sering kali dokumen penguatan moderasi beragama jatuh pada kalimat normatif yang “benar secara moral”, tetapi tidak jelas pijakan indikatornya, tidak jelas mekanisme perubahan sosialnya, dan pada akhirnya sulit dieksekusi serta sulit dievaluasi. Karena itu, setiap arah strategi di bawah ini dibangun dengan logika 1) indikator IMB apa yang menjadi pijakan, 2) problem sosial yang tersirat di balik skor rendah dimensi adaptif budaya lokal, dan 3) bagaimana lensa teori membantu menjelaskan mekanisme perubahan yang realistis, bukan sekadar menyatakan harapan.



Strategi penguatan diarahkan secara disiplin pada indikator IMB, dengan fokus menggeser pertentangan “agama versus tradisi” menjadi pemaknaan budaya sebagai kebijaksanaan, jembatan persaudaraan, dan media pendidikan moral. Pendekatan ini menekankan reframing makna, perluasan legitimasi sosial, serta penguatan arena dialog agar perubahan tidak berhenti pada sikap normatif, tetapi bekerja pada mekanisme sosial yang nyata.



Pertama, strategi diarahkan pada reduksi logika pertentangan “agama versus tradisi lokal” melalui reframing makna publik. Indikator yang menjadi basisnya menegaskan bahwa ajaran agama dan tradisi lokal tidak harus dipertentangkan. Pada praktiknya, problem yang sering muncul bukan semata-mata perbedaan dalil, melainkan cara publik menamai sebuah tradisi yaitu apakah tradisi dibaca sebagai “ritual agama” yang harus diuji kemurniannya, atau sebagai “praktik sosial” yang berfungsi menjaga solidaritas, etika, dan keteraturan. Di sini lensa Geertz membantu memindahkan pusat perdebatan dari perdebatan “benar-salah teologis” menuju “makna simbolik” yang bekerja dalam kehidupan sosial. Tradisi dapat dibaca sebagai simbol etika publik, misalnya simbol syukur atas rezeki alam, simbol kepedulian ekologis, simbol penghormatan kepada leluhur sebagai sejarah komunitas, atau simbol solidaritas antartetangga. Pergeseran pemaknaan ini bukan sekedar trik retorika, melainkan cara meredakan konflik makna. Ketika tradisi dipahami sebagai sarana memperkuat kebajikan sosial, publik lebih mudah menerimanya tanpa merasa sedang “mengganti ajaran agama”.

Dalam kerangka bourdeau pertentangan agama-tradisi sering diproduksi oleh relasi kuasa simbolik. Ada pihak yang menempatkan dirinya sebagai otoritas penjaga kemurnian agama dan menganggap bahwa tradisi sebagai “menyimpang” dari ajaran agama. Dalam kondisi seperti ini, strategi penguatan tidak cukup hanya diarahkan pada perubahan sikap individu melalui sosialisasi atau

kampanye. Yang lebih menentukan adalah intervensi pada arena legitimasi, yaitu ruang tempat otoritas, definisi “benar-salah”, dan batas “boleh-tidak boleh” diproduksi dan diakui. Jika arena legitimasi dikuasai satu pihak, maka



pesan moderasi mudah kalah oleh mekanisme penguatan simbolik yang sudah mapan. Artinya, perlu dibangun forum bersama yang memperluas sumber legitimasi dan mengakui pluralitas praktik: tokoh agama, tokoh adat, pendidik, dan pemuda duduk dalam satu arena untuk terus mendialogkan batas-batas yang jelas (mana yang nilai sosial, mana yang akidah, mana yang adat), sehingga tuduhan “penyimpangan tradisi” tidak menjadi norma sosial baru. Tanpa perubahan arena legitimasi, pendekatan sosialisasi saja sering kalah oleh tekanan simbolik dari kelompok yang lebih dominan.

Kedua, strategi diarahkan pada penegasan adaptasi budaya sebagai kebijaksanaan, bukan penyimpangan. Indikator yang menjadi pijakan menyatakan bahwa penyesuaian praktik agama dengan budaya lokal adalah kebijaksanaan. Dalam lensa Geertz, agama hadir dalam bentuk-bentuk simbolik yang ditafsirkan dan dihidupi melalui ritus serta kebiasaan lokal. Karena itu, variasi ekspresi tidak otomatis sama dengan penyimpangan, selama nilai intinya tidak berubah. Misalnya, pesan moral dan spiritual tetap sama, tetapi medium komunikasinya mengikuti kosakata budaya setempat agar dapat dipahami dan diterima. Penegasan ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada standardisasi tunggal yang menganggap satu bentuk ekspresi sebagai satu-satunya model “paling benar”, lalu menilai bentuk lain sebagai salah.

Dalam lensa Bourdieu, strategi penguatan perlu diarahkan pada pembangunan symbolic authorization, yaitu perangkat legitimasi yang membuat suatu praktik dipandang sah di ruang publik. Bentuknya dapat berupa dokumen pedoman, narasi resmi lembaga, pelatihan terstruktur bagi pendidik dan penyuluh, serta dukungan terbuka dari tokoh yang diakui. Melalui perangkat ini, penjelasan tentang adaptasi budaya dapat ditempatkan sebagai ranah nilai sosial-kultural, tanpa otomatis dipersepsikan sebagai penyimpangan akidah.

Jika symbolic authorization tidak tersedia, respons yang muncul biasanya bukan dialog kritis, melainkan strategi aman. Banyak pihak memilih menghindari tradisi lokal, menahan inovasi pedagogis, dan membiarkan stigma berkembang tanpa koreksi, karena risiko sosial dianggap lebih besar daripada manfaat edukatif. Dalam situasi seperti ini, wacana dominan tidak perlu membuktikan diri; ia cukup beroperasi melalui ketakutan untuk salah, ketakutan untuk dicap, dan ketakutan kehilangan pengakuan. Opportunity cost dari pembiaran ini besar. Ruang budaya yang seharusnya berfungsi sebagai medium kohesi sosial dan pembelajaran kebajikan publik justru berubah menjadi sumber ketegangan laten.

Ketiga, strategi mengafirmasi budaya lokal sebagai jembatan persaudaraan sekaligus infrastruktur sosial. Indikator yang menjadi pijakan menyebut budaya lokal dapat menjadi jembatan persaudaraan antarumat beragama. Yang perlu ditekankan, “jembatan persaudaraan” bukan sekadar jargon tentang kerukunan, tetapi harus diterjemahkan sebagai pengalaman sosial yang berulang dan terlembaga. Geertz memaknai tradisi sebagai ruang pertemuan bermakna. Orang hadir dalam satu kegiatan, berbagi pengalaman, merasakan emosi kolektif, dan meneguhkan identitas sebagai warga komunitas yang sama. Pertemuan seperti ini menurunkan prasangka



karena prasangka sering hidup ketika kelompok tidak punya pengalaman bersama, begitu ada pengalaman bersama, label negatif lebih mudah terkoreksi oleh realitas sosial yang dialami langsung.

Keempat, strategi mengintegrasikan budaya lokal sebagai media dakwah dan pendidikan moral. Indikator yang menjadi basis menyatakan budaya lokal dapat menjadi media dakwah dan pendidikan moral. Lensa Geertz menekankan pentingnya simbol sebagai bahasa bersama, budaya lokal menyediakan idiom, metafora, narasi, dan ritus yang sudah dipahami masyarakat. Jika pesan moral disampaikan melalui bahasa simbolik yang familiar, ia lebih mudah diterima tanpa resistensi, karena masyarakat merasa pesan itu “milik kita”, bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar. Lensa Bourdieu menambahkan dimensi institusional: sekolah adalah arena reproduksi habitus, yaitu tempat nilai menjadi kebiasaan melalui kurikulum, keteladanan, dan praktik belajar yang konsisten. Itu artinya, integrasi budaya lokal tidak cukup berupa tambahan materi atau lomba budaya, melainkan harus masuk dalam desain pembelajaran, proyek siswa, penilaian sikap, dan iklim sekolah. Jika sekolah hanya “mengajarkan” moderasi sebagai konsep, tetapi tidak menyediakan praktik nyata yang membangun kebiasaan menghargai tradisi dan merawat kohesi, hasilnya rapuh. Dalam konteks pendidik, ini juga berarti penguatan kapasitas guru: guru perlu contoh modul, contoh aktivitas, contoh asesmen, dan dukungan kepala sekolah agar integrasi budaya lokal tidak berhenti pada inisiatif personal yang mudah hilang ketika guru berganti.

Keempat arah strategi ini memiliki benang merah yang konsisten, yaitu menggeser persoalan dari slogan normatif menuju mekanisme sosial yang operasional. Strategi diarahkan untuk menata ulang cara memaknai tradisi (reframing), menyediakan legitimasi sosial bagi adaptasi, mengubah tradisi menjadi praktik kohesi yang berulang (infrastruktur sosial), dan menginstitusionalisasikan integrasi budaya lokal dalam pendidikan serta dakwah (reproduksi habitus). Dengan kerangka ini, strategi penguatan tidak berhenti pada klaim “budaya itu baik” atau “kita harus toleran”, tetapi bergerak pada mekanisme sosial yang lebih konkret yaitu siapa yang memberi legitimasi, di arena mana pertarungan makna terjadi, praktik apa yang harus diulang agar menjadi kebiasaan, dan lembaga mana yang memastikan keberlanjutan.

Arah strategi tersebut sejalan dengan temuan literatur yang menekankan penguatan melalui pembiasaan, pembudayaan, dan pemberdayaan di madrasah (Fauzian et al., 2021), pengembangan model pembelajaran yang mengintegrasikan budaya lokal secara pedagogis (Fahrudin et al., 2025), pemahaman tradisi sebagai infrastruktur sosial bagi kerukunan (Pelupessy, 2025; Tohari & Nafiuddin, 2024), serta kebutuhan menata ulang relasi agama dan budaya dalam menghadapi disrupsi, termasuk pengaruh ruang digital yang dapat mempercepat polarisasi narasi (Muna & Lestari, 2023).

5.3 Dari Strategi ke Tindakan: Rancangan Intervensi Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal

gar tidak berujung sebagai program yang spekulatif, rancangan penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal ini disusun dengan menekankan keterukuran melalui indikator IMB, sekaligus membedakan strategi intervensi



Penguatan moderasi beragama dirancang sebagai intervensi terukur dengan membedakan kanal masyarakat umum dan masyarakat pendidik. Rancangan program menargetkan sekaligus penguatan cara pandang (legitimasi kognitif-etik) dan praktik sosial berulang agar adaptasi budaya tidak hanya dilakukan, tetapi juga dipahami dan dipertahankan secara berkelanjutan.



berdasarkan kanal sasaran, yaitu masyarakat umum dan masyarakat pendidik, sehingga arah, keluaran, dan indikator hasil dapat dirumuskan secara jelas dan dapat dievaluasi secara konsisten.

Jika strategi hanya menysar “praktik” tanpa memperkuat “cara pandang”, akan mengulang masalah IMB (cara pandang terendah). Blind spot yang sering terjadi adalah kegiatan ramai, skor tidak bergerak. Karena itu, rancangan di atas sengaja memasukkan keluaran yang menarget legitimasi kognitif-etik (khususnya bagi pendidik) sekaligus pengalaman sosial berulang (khususnya bagi masyarakat umum) untuk membentuk habitus moderat.

Selanjutnya dalam hal tata kelola penguatan perlu memisahkan arena implementasi sesuai desain IMB yaitu arena komunitas (masyarakat umum) dan arena institusi pendidikan (masyarakat pendidik), namun tetap disinkronkan melalui narasi legitimasi bersama. Prinsip implementasi yang konsisten dengan indikator dan teori adalah: (1) menghindari pertentangan agama dan tradisi lokal sebagai narasi publik; (2) memastikan adaptasi budaya dipahami sebagai kebijaksanaan melalui rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) memaksimalkan fungsi tradisi sebagai perekat persaudaraan dan media pendidikan moral.

TABEL 5.1
Rancangan Program Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal

Masalah kunci (berdasar temuan IMB)	Kanal sasaran	Arah intervensi (berdasar indikator IMB)	Contoh keluaran yang dapat dicatat
Kehati-hatian mengintegrasikan budaya lokal ke praktik keagamaan	Masyarakat umum	Klarifikasi batas akomodasi budaya sebagai kebijaksanaan	Musyawarah adat-agama, dokumen relasi Budaya-Agama, dialog warga lintas kelompok
	Masyarakat pendidik	Penguatan argumentasi pedagogis-etik tentang akomodasi budaya	Lokakarya guru/dosen, Pedoman etika-pedagogi, perangkat ajar berbasis kasus
Tradisi adat dicurigai menyimpang secara teologis meski bermakna syukur ekologis	Masyarakat umum	Reposisi tradisi sebagai syukur ekologis dan etika publik	Narasi publik tradisi-syukur lingkungan, praktik bersama pemulihan lingkungan berbasis tradisi



	Masyarakat pendidik	Literasi tradisi sebagai sumber pendidikan moral dan keberlanjutan	Modul ajar lintas mapel/PAI/PAK, proyek berbasis tradisi dan lingkungan
Budaya belum dipahami sebagai perekat sosial lintas iman	Masyarakat umum	Penguatan fungsi budaya sebagai jembatan persaudaraan	Kegiatan lintas komunitas berbasis tradisi lokal, ruang Dialog inklusif
	Masyarakat pendidik	Desain pengalaman belajar kolaboratif lintas identitas	Pembelajaran kolaboratif, kunjungan budaya, dialog terstruktur berbasis tradisi
Budaya belum dipahami sebagai media pendidikan moral	Masyarakat umum	Tradisi sebagai kanal etika publik	kampanye moral berbasis simbol dan tradisi lokal
	Masyarakat pendidik	Integrasi budaya lokal dalam pendidikan moral	RPP/modulProyek penguatan karakter, praktik keteladanan



Penguatan moderasi berbasis kearifan lokal menuntut intervensi yang menyasar problem tafsir simbol dan kontestasi legitimasi, bukan sekadar sosialisasi nilai. Dengan mengintegrasikan budaya sebagai kebijaksanaan, jembatan persaudaraan, dan media pendidikan moral, strategi ini diarahkan untuk memperkuat dimensi adaptif budaya lokal secara konsisten, terukur, dan dapat dievaluasi melalui indikator IMB



Pembagian peran aktor disusun sederhana namun fungsional. Aktor kebijakan berperan sebagai pengarah yang menjaga kerangka indikator dan target pengukuran; aktor komunitas sebagai pemilik tradisi sekaligus penyedia ruang praktik sosial; aktor pendidik sebagai penguat internalisasi nilai melalui kurikulum, keteladanan, dan pengalaman belajar. Literatur menunjukkan bahwa model berbasis komunitas efektif ketika tradisi menjadi ruang praktik lintas iman dan keterampilan budaya diperkuat (Wirawan et al., 2022), sementara model berbasis pendidikan efektif ketika integrasi nilai moderasi dan budaya lokal masuk ke pembelajaran dan kultur sekolah ((Fahrudin et al., 2025; Fauzian et al., 2021).

5.4. Analisis dan Arah Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Budaya Lokal

Bagian ini menegaskan bahwa dimensi Adaptif Budaya Lokal merupakan titik terlemah dalam IMB 2025 pada masyarakat umum maupun pendidik, dan hal itu dapat dimaknai sebagai potensi gesekan antara identitas budaya dan identitas keagamaan. Resistensi utama berupa kehati-hatian integrasi budaya ke praktik keagamaan dan kecurigaan tradisi sebagai penyimpangan teologis meskipun bermakna syukur ekologis.

Melalui lensa Geertz, problem tersebut adalah problem tafsir simbol yang membuat tradisi kehilangan makna etiknya di ruang publik. Dalam kerangka Bourdieu, problem itu juga merupakan kontestasi legitimasi dan otoritas simbolik yang membuat adaptasi budaya tampak tidak aman secara sosial. Karena itu, arah penguatan yang konsisten dengan data dan teori diarahkan pada: (1) menguatkan cara pandang bahwa ajaran agama dan tradisi lokal tidak harus dipertentangkan; (2) menegaskan adaptasi budaya sebagai kebijaksanaan yang memiliki dasar etik-pedagogis; (3) mengaktifkan fungsi budaya lokal sebagai jembatan persaudaraan lintas iman; dan (4) mengintegrasikan budaya lokal sebagai media dakwah dan pendidikan moral melalui kanal komunitas dan kanal pendidikan secara simultan.

Dengan demikian, penguatan moderasi berbasis kearifan lokal ditempatkan sebagai intervensi terukur yang menysar titik lemah yang telah dipetakan oleh IMB 2025 dan dapat dievaluasi ulang menggunakan indikator yang sama, bukan sebagai tambahan seremonial.



INDEKS 2015
MATERIA S I
KETERANGAN

BAB VI

P E N U T U P



6.1. Kesimpulan

Buku Laporan Indeks Moderasi Beragama 2025 memberikan fondasi data empiris mengenai kondisi moderasi beragama masyarakat Indonesia. Hasil survei nasional menunjukkan bahwa tingkat moderasi beragama masyarakat Indonesia berada pada kategori tinggi, baik pada kelompok masyarakat umum (74,72), maupun masyarakat pendidik (77,32). Capaian ini menegaskan bahwa nilai-nilai dasar moderasi beragama telah relatif terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan pendidikan, serta menjadi modal sosial penting bagi penguatan kerukunan dan persatuan nasional

Dimensi Komitmen Kebangsaan dan Anti Kekerasan muncul sebagai pilar terkuat pada kedua kelompok responden. Temuan ini memperlihatkan kuatnya penerimaan masyarakat terhadap Pancasila, NKRI, serta penolakan terhadap kekerasan atas nama agama. Kondisi tersebut berfungsi sebagai faktor protektif terhadap berkembangnya ekstremisme dan radikalisme, sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat majemuk.

Namun demikian, buku ini juga mengidentifikasi secara konsisten bahwa dimensi Adaptif terhadap Budaya Lokal merupakan dimensi dengan capaian masih rendah, baik pada masyarakat umum maupun masyarakat pendidik. Rendahnya capaian pada dimensi ini tidak mencerminkan penolakan terbuka terhadap budaya lokal, melainkan menunjukkan masih adanya kehati-hatian, ambivalensi, dan jarak kognitif dalam memaknai relasi antara ajaran agama dan ekspresi budaya lokal. Pada banyak konteks, adaptasi budaya belum sepenuhnya dipahami sebagai kebijaksanaan keagamaan, melainkan masih dipersepsikan berpotensi menyimpang secara teologis.

Di lingkungan pendidikan, kondisi ini menjadi lebih signifikan karena pendidik berperan strategis sebagai agen transmisi nilai dan pembentuk cara pandang generasi muda. Meskipun pendidik mencatatkan skor moderasi beragama yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum, kesenjangan antara pemahaman normatif dan implementasi praksis, terutama terkait budaya lokal menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama masih bersifat dinamis dan memerlukan penguatan berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan utama survei ini menegaskan bahwa tantangan moderasi beragama ke depan tidak lagi terletak pada aspek komitmen kebangsaan atau penolakan terhadap kekerasan, melainkan pada kemampuan mengelola relasi agama dan budaya secara lebih kontekstual, inklusif, dan berkeadilan. Dimensi adaptif budaya lokal menjadi titik intervensi kebijakan yang paling strategis dan mendesak.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi kebijakan dirumuskan untuk memastikan penguatan moderasi beragama berjalan lebih terarah, terukur, dan berbasis bukti sebagai berikut:

1. Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Budaya Lokal sebagai Prioritas Kebijakan.

Kementerian Agama perlu menempatkan dimensi adaptif terhadap budaya lokal sebagai fokus utama dalam agenda penguatan moderasi be-



ragama periode berikutnya. Budaya lokal harus diposisikan bukan sebagai entitas yang dipertentangkan dengan agama, melainkan sebagai medium strategis untuk menanamkan nilai-nilai etika publik, persaudaraan, dan kemaslahatan bersama.

2. **Integrasi Sistematis Kearifan Lokal dalam Pendidikan Keagamaan dan Umum**

Pada kanal pendidikan, diperlukan pengembangan modul pembelajaran, bahan ajar, dan praktik pedagogis yang mengintegrasikan nilai moderasi beragama dengan kearifan lokal secara terstruktur. Pelatihan berjenjang bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek konseptual moderasi beragama, tetapi juga pada kemampuan pedagogis untuk mengaitkan ajaran agama dengan konteks budaya setempat.

3. **Penguatan Literasi Keagamaan Kontekstual bagi Masyarakat Umum**

Bagi masyarakat umum, penguatan moderasi beragama berbasis budaya lokal dapat dilakukan melalui program komunitas, dialog agama–budaya, festival budaya, serta revitalisasi tradisi lokal yang memiliki nilai persaudaraan dan kepedulian sosial. Pendekatan berbasis komunitas ini penting untuk membangun pengalaman sosial langsung yang memperkuat toleransi aktif, bukan sekadar penerimaan pasif.

4. **Pengarusutamaan Budaya Lokal sebagai Media Dakwah dan Pendidikan Moral**

Budaya lokal perlu dipromosikan sebagai sarana dakwah dan pendidikan moral yang kontekstual dan membumi. Pendekatan ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik sosial, sekaligus meningkatkan daya terima pesan keagamaan di tengah masyarakat yang beragam secara budaya.

5. **Pemanfaatan Indeks Moderasi Beragama sebagai Instrumen Evaluasi Kebijakan**

Penguatan Moderasi Beragama dan digunakan secara berkelanjutan sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kebijakan. Pengukuran berkala dengan indikator yang konsisten memungkinkan pemerintah menilai efektivitas intervensi, mengidentifikasi pergeseran sosial, serta memastikan bahwa program penguatan moderasi beragama benar-benar berdampak.

6. **Penguatan Sinergi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan**

Penguatan moderasi beragama tidak dapat berjalan secara sektoral. Diperlukan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/majelis keagamaan, dan komunitas budaya agar penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal dapat berkelanjutan dan kontekstual sesuai karakteristik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA



Asrawijaya, E. (2022). Harmonization between customs and Islam in the Jalawastu Community. *Journal of Indonesian Islam*, 16(2), 378–398.

Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural*. Pustaka Pelajar.

Fahrudin, A. H., Musthofa, I., & Ikmal, H. (2025). Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama dan Nilai Budaya Lokal di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lamongan. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 1–13.

Fauzian, R., Ramdani, P., & Yudiyanto, M. (2021). Penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal dalam upaya membentuk sikap moderat siswa madrasah. *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies*, 6(1), 1–14.

Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.

<https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0>

<https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>.

Muna, C., & Lestari, P. (2023). Penguatan agama dan wawasan budaya sebagai upaya dalam menumbuhkan spirit moderasi beragama. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), 236–251.

Pelupessy, P. J. (2025). Construction of Religious Moderation Patterns among the Ocu Community in Kampar, Riau through the Modernization of Local Cultural Values: A Cultural and Religious Anthropology Perspective. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 858–867.

Suhirman, Nurlaili, Rohimin, Syarifin, A., & Lestari, M. (2025). Educational Technology to Facilitate Access to Local Wisdom Practices in Religious Moderation. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 6(3), 349–357. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i03.05129>

Takdir, M. (2025). Moderation reasoning based on religious literacy to prevent radicalisation among interfaith Generation Z in Indonesia. *International Studies in Catholic Education*, 1–16.

Tohari, A., & Nafiuddin, A. (2024). Moderasi beragama dalam kearifan lokal. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 3(2), 138–159.

Wirawan, I. W. A., Sumari, M., Karyana, I. N. P., Sutriani, I. A. N. S., & Rindayanti, D. (2022). Penyuluhan Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Hindu. *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104–119



KEMENTERIAN AGAMA RI
2025